



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BEKASI**

**LAPORAN
KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI
2022**

***LAPORAN
KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI
2022***

**LAPORAN KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI
2022**

No. Publikasi : 32160.2301
Katalog BPS : 1202059.3216
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : x + 90 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Bekasi

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Bekasi

Diterbitkan oleh:

BPS Kabupaten Bekasi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Bekasi sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Bekasi. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bekasi tahun 2020 - 2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. Seluruh pimpinan BPS Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Bekasi, Januari 2023

Kepala BPS Kabupaten Bekasi,



Nevi Hendri, S.Si, M.M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bekasi Dengan Dukungan Anggaran 2022	8
1.5. Potensi dan Permasalahan	13
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	20
Bab II. Perencanaan	22
2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Bekasi 2020-2024	23
2.2. Tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi	28
2.3. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bekasi	32
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	39
Bab III. Akuntabilitas	41
3.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi Kabupaten Bekasi Tahun 2022	42
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021	62
3.3. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020 - 2024	65
3.4. Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	67
3.5. Kinerja Anggaran Tahun 2022	73
3.6. Kegiatan Prioritas di BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	79
3.8. Penghargaan dan Inovasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	123
Bab IV. Penutup	127
4.1. Tinjauan Umum.....	128
4.2. Tantangan dan Kendala Utama	130
4.3. Saran dan Tindak Lanjut	131
Lampiran	133

DAFTAR TABEL

1.1	Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	6
1.2.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	12
2.1	Rumusan Visi dan Misi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	24
2.2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	29
2.3	Indikator dan Target BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	31
2.4	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	39
3.1	Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	43
3.2	Nilai Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	43
3.3	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	47
3.4	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	53
3.5	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	56
3.6	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	59
3.7	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020	63
3.8	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	64
3.9	Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2021	65
3.10	Rincian Anggaran A	70
3.11	Rincian Anggaran B	71
3.12	Efisiensi Program Dukungan Manajemen.....	72
3.13	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program	73
3.14	Anggaran Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis	74
3.15	Presentase Efisiensi Menurut Sasaran Program, Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	76
3.16	Realisasi Pagu Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021	79
3.17	Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2022	79
3.18	Penghargaan, Quick Wins dan Agenda Perubahan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	104

DAFTAR GAMBAR

1.1	Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Desember Tahun 2022	8
1.2	Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Statistisi Tahun 2022	10
1.3	Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2022	11
2.1	Nilai Inti BPS	27
2.2	Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2020 – 2024 ...	36
3.1	Rata-rata Target, Realisasi,, dan Capaian Kinerja Tahun 2022 per Tujuan/Sasaran	48
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Program	74
3.3	Nilai SMART BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	77
3.4	Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	78
3.5	Penghargaan yang Diterima BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	104

DAFTAR LAMPIRAN

1	Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi	133
2	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022.....	134
3	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2022	137
4	Capaian Kinerja Triwulanan (CKT) BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	144
5	<i>Respon Rate</i> Sensus dan Survei Tahun 2022.....	145
6	Tabel Bantu Anggaran, Realisasi, Efisiensi Dirinci Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun Anggaran 2021	148
7	Tabel ARC Publikasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	151
8	Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan – SKD 2021.....	153
9	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST – SKD 2021	154
10	Rincian Revisi DIPA Satker di Wilayah BPS Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021	155

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara kelembagan BPS ditetapkan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Sebagai instansi pemerintah, BPS memiliki peranan dalam perstatistikan nasional dan merupakan pusat rujukan data, metadata maupun penyelenggara kegiatan statistik. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan dan memformulasikan kebijakan. Peranan sentral yang dimiliki BPS ini memerlukan komitmen kuat dari setiap aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan penguatan akuntabilitas instansi.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 BPS Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Tahun 2020 – 2024, hal tersebut merupakan perwujudan visi, misi, tujuan, yang tertuang dalam sasaran strategis BPS Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 – 2024 dan kemudian disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS Kabupaten Bekasi periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 terkait visi nya, menyimpulkan secara umum realisasi tingkat capaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan cukup baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan sasaran sebesar 100,62 persen pada target Renstra tahun 2022.

Implementasi tujuan strategis BPS Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut : tujuan pertama yaitu Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan rata-rata

capaian kinerja 111,44 persen, kemudian tujuan kedua Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan rata-rata capaian 110,00 persen. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I dengan capaian sebesar 100,00 persen dan tujuan keempat yakni Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan sasaran SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,86 persen.

Sementara keempat tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) indikator-indikator sasaran strategis sehingga pencapaiannya lebih terukur dan terperinci. Tercatat capaian kinerja dari 7(tujuh) indikator sasaran, 6 (enam) indikator diantaranya telah melampaui target yang telah ditetapkan, sementara 1 (satu) indikator lainnya yakni indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum memenuhi target yang diharapkan, dengan target 74,5 point tercapai 62,34 point untuk penilaian SAKIP.

Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar 91,57 persen dari total anggaran Rp 8.606.093.000,-. BPS Kabupaten Bekasi melakukan *refocussing* anggaran sesuai dengan ketentuan dari BPS Pusat dengan metode penghematan/*self-blocking* dengan nominal penghematan anggaran selama tahun 2022 sebesar 2.847.012.000,- rupiah yang sebagian besar dipergunakan dalam rangka penanganan dan pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga terjadi efisiensi besar-besaran

terutama pada Program PPIS. Namun demikian semua kegiatan tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” . Pada penyusunan RKP tahun 2022, penajaman dilakukan terhadap Program Prioritas Nasional (PN). Untuk mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional (PN) tersebut, BPS Kabupaten Bekasi selama tahun 2022 melakukan rangkaian kegiatan pada 6 (enam) output, yaitu :

1. Sensus Penduduk (SP) 2020;
2. Survei Statistik Wisatawan Nusantara;
3. Survei Statistik Wisatawan Manca Negara;
4. Survei Statistik E-Commerce;

5. Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan;

6. Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode KSA;

Sepanjang tahun 2022 semua Program, Kegiatan dan Anggaran telah dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien sehingga hasil optimal yang dicapai sudah sejalan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang masih rendah pencapaiannya pada tahun 2022, akan menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan tahun selanjutnya.

1 *PENDAHULUAN*

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2022

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyediakan data statistik dasar. Data ini dapat dijadikan input bagi perencanaan kebijakan pembangunan nasional. Peran BPS ini diperkuat oleh landasan legal UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yaitu menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban tugas yang diberikan kepada BPS berkonsekuensi terhadap komitmen aparatur sipil negara BPS untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Statistik dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat luas khususnya pengguna data dan informasi statistik.

Komitmen seluruh aparatur sipil negara BPS Kabupaten Bekasi mencakup pertanggungjawaban terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih jauh, diperlukan pengukuran kinerja organisasi diperlukan sebagai indikator kesuksesan organisasi. Sebagai institusi pemerintah maka BPS menetapkan visi dan misi yang merupakan landasan utama untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai. Visi BPS tahun 2020-2024 adalah Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju.

Upaya peningkatan kinerja organisasi BPS memiliki sinergi kuat dengan agenda Reformasi Birokrasi BPS dengan sepuluh area perubahan dimana secara umum bertujuan membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas tinggi dan mengemban amanah dalam memberi pelayanan prima atas hasil data statistik yang terpercaya sehingga menjadi aksesibel oleh pengguna data.

Secara khusus pada pilar ketujuh area perubahan Reformasi Birokrasi BPS terdapat penguatan akuntabilitas kinerja dimana kinerja organisasi dievaluasi dengan penilaian terhadap pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama.

Bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja program dan kegiatan terhadap pemakaian anggaran pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja secara periodik.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bekasi melalui Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Bekasi pada tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bekasi berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk sistematikanya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.

1. Mengenali potensi dan permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi;
2. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output*;
3. Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap perencanaan yang dilakukan;
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan pengguna data;
5. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut: Badan Pusat Statistik adalah instansi vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai instansi vertikal, BPS mempunyai kantor perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perwakilan BPS pada tingkat kecamatan diwakili oleh para Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

a. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, bahwa BPS Kabupaten Bekasi adalah Perwakilan BPS di Daerah Tingkat I Kabupaten Bekasi dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS RI.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi maka pada BPS Provinsi dipimpin oleh seorang kepala pejabat setingkat Eselon II, yang membawahi satu Bagian Umum yaitu Kepala Bagian Umum dan lima Koordinator Fungsi yaitu Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Produksi, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi

Statistik. Perwakilan BPS di daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di daerah dan bertugas membantu Pemerintah Daerah setempat dalam penyelenggaraan statistik daerah dan penyediaan data yang diperlukan.

b. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, BPS Kabupaten Bekasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, BPS Kabupaten Bekasi berupaya menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional maupun regional, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan cara mengembangkan statistik spesifik daerah.

c. Fungsi

Adapun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, BPS Kabupaten Bekasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Regional Kabupaten Bekasi di bidang kegiatan statistik;
2. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Bekasi;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
4. Fasilitator pembinaan statistik terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;

d. Susunan Organisasi

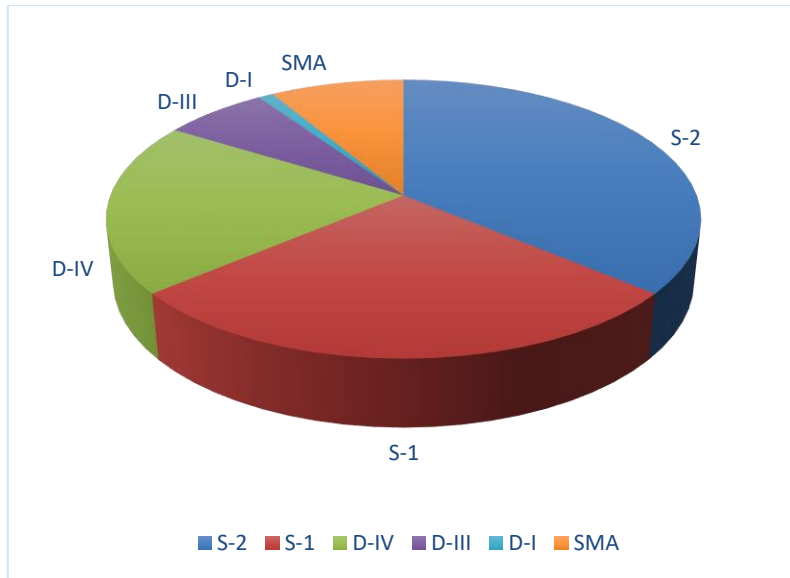
Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi, maka susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.

*Tabel 1.1.
Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022*

NO.	JABATAN		TUGAS TAMBAHAN
	SEBELUM PENYEDERHANAAN ORGANISASI	SETELAH PENYEDERHANAAN ORGANISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala BPS Kabupaten	-	-
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Umum	-

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bekasi dengan Dukungan Anggaran 2022

Jumlah pegawai BPS di Kabupaten Bekasi kondisi bulan Desember tahun 2022 berjumlah 42 pegawai. Secara tidak langsung salah satu indikator yang dapat menentukan kualitas suatu SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawainya. SDM BPS Kabupaten Bekasi secara kualitas pendidikan sebenarnya sudah sangat memadai, namun jumlahnya masih kurang ideal dibanding beban kerja yang ada.



Gambar 1.1.
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Tingkat Pendidikan
Bulan Desember tahun 2022

Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi menurut tingkat pendidikan terdiri dari pegawai dengan pendidikan S-2 sebanyak 9 orang (21%), berikutnya S-1 sebanyak 12 orang (28,57%), D-IV sebanyak 4 orang (9.5%), D-III sebanyak 4 orang (9,5%), dan SMA sebanyak 13 orang (30,9%). Gambaran tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Bekasi cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

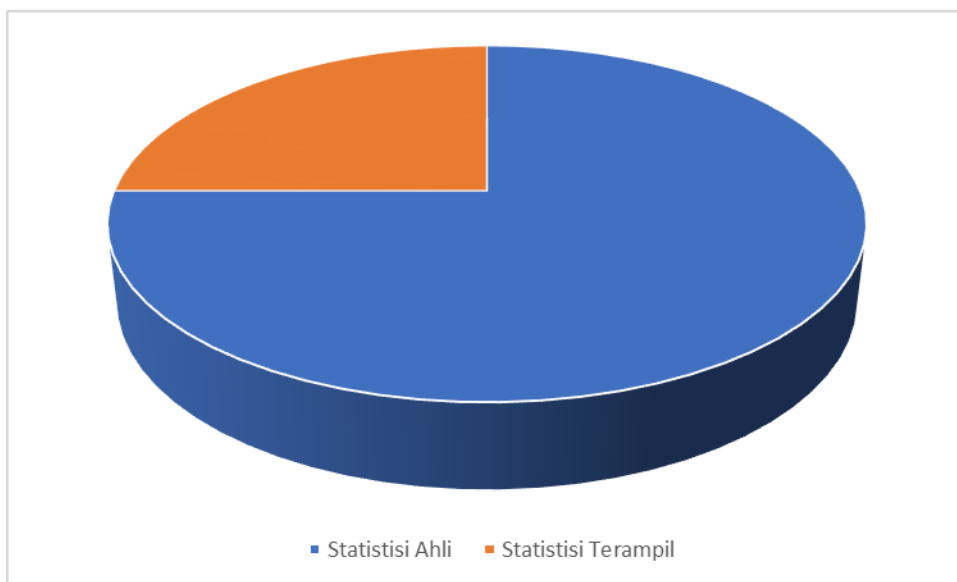
Meskipun kualitas SDM secara umum baik, namun mengingat beban pekerjaan per pegawai cukup besar tentu hal ini bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan. Oleh karena itu perlu memperhitungkan beban tugas di masing-masing fungsi dalam menentukan jumlah SDM di fungsi tersebut.

Peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan. Selain mendidik calon pegawai melalui sekolah kedinasan milik BPS yaitu Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS), peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas rintisan pendidikan gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 melalui jalur Tugas Belajar dan Izin belajar. Tahun 2022, sebanyak 1 pegawai BPS di Kabupaten Bekasi

mendapatkan tugas belajar dengan rincian 1 pegawai melanjutkan ke jenjang pendidikan S-2

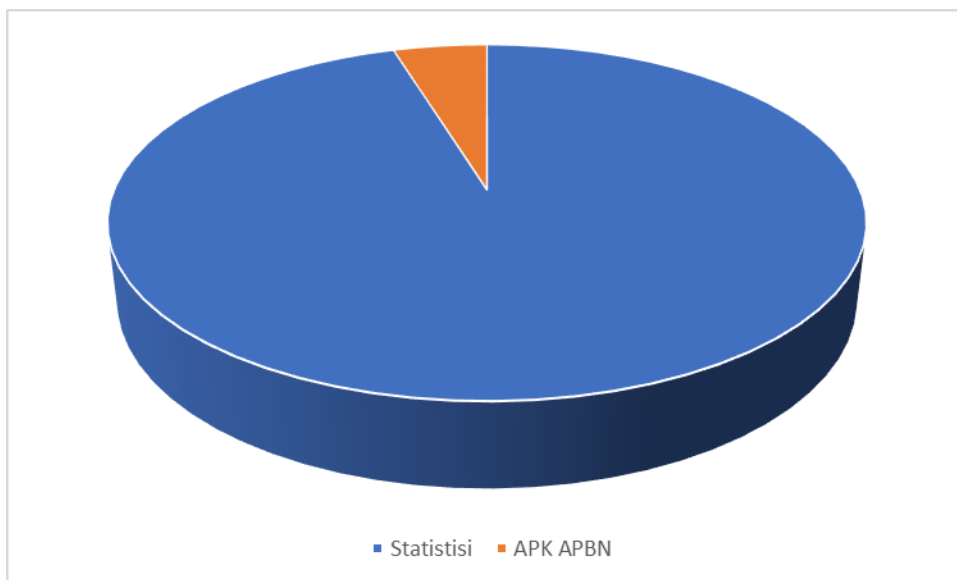
Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 21 pegawai (50 persen) dari sejumlah 42 pegawai BPS Kabupaten Bekasi telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS Kabupaten Bekasi sebesar 95 persen atau 20 pegawai merupakan pejabat fungsional statistisi, dengan rincian sebagai berikut: 15 pegawai merupakan statistisi tingkat ahli dan 5 pegawai merupakan statistisi tingkat terampil (Gambar 1.2).



Gambar 1.2.
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Statistisi

Selain pejabat fungsional statistisi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi membuka peluang bagi pegawainya untuk mengambil jabatan fungsional tertentu lainnya. Dari 21 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 1 orang adalah pejabat fungsional tertentu lainnya Analis Pengelola Keuangan APBN (1 orang). Grafik dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu SDM BPS Kabupaten Bekasi
Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2022

Tabel 1.2.
Jumlah pegawai menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PERSEN	JENIS KELAMIN			
				LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala BPS Kabupaten Bekasi	1	2.38	1	100	0	0
2.	Kepala Subbagian Umum	1	2.38	1	100	0	0
3.	Pelaksana (Fungsional Umum)	18	42.86	9	50	9	50
4.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	2.38	0	0	1	100
5.	Statistisi Ahli Madya	1	2.38	1	100	0	0
6.	Statistisi Ahli Muda	8	19.05	2	25	6	75
7.	Statistisi Ahli Pertama	6	14.29	2	33	4	67
8.	Statistisi Penyelia	2	4.76	1	50	1	50
9.	Statistisi Mahir	4	9.52	2	50	2	50
TOTAL		42	100,00	19	100,00	23	100,00

1.5. Potensi Dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar.

BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.

Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Bekasi.

BPS Kabupaten Bekasi memiliki peran yang krusial di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's.

BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

1.5.2. Permasalahan

BPS Kabupaten Bekasi telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Bekasi harus mendapatkan respon yang tepat. Sehingga citra BPS Kabupaten Bekasi sebagai pelopor data terpercaya bagi semua dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data;
2. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS

Kabupaten Bekasi merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Bekasi adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Bekasi dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui;

3. Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan daerah pemekaran;
4. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat;
5. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad-hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad-*

hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan;

6. Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah;
7. BPS Kabupaten Bekasi memiliki sistem dan infrastruktur TI yang belum cukup memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi;
8. Di sisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan *data administrative*) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya *big data* tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain:
 - Pengurangan biaya,
 - Pengurangan waktu,
 - Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
 - Pengambilan keputusan yang cepat.

9. Prasarana dan sarana yang tidak memiliki standar, membuat kebutuhan BPS tidak memiliki arah yang tepat dalam proses penyediaannya. Penekanan *infrastructure grand map* yang menjadi arah pengembangan *office standardized needs* hingga saat ini masih bersifat wacana. Maka perlu adanya perbaikan dalam pemetaannya dan fokus dalam implementasinya guna meningkatkan pelayanan pengguna data dan internal pegawai.
10. Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada output yang dihasilkan guna mencapai outcome yang diharapkan. Hal ini berpengaruh pada kualitas data yang berimbas pada tingkat kepuasan pelayanan terhadap pengguna data. Sebagai lembaga yang mempunyai visi “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, diharapkan selalu meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kantor modern yang berprinsip *money follow program* yang berorientasi *outcome*.
11. Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saat ini yang hanya sebagai enabler sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan. Peran TIK saat ini bukan hanya sebagai *tools* tetapi dengan berprinsip “*IT used as salutation in measuring the success*” bukanlah menjadi jawaban terhadap tantangan ke depan. Kelemahan terhadap ketergantungan pada produk TIK memang tidak dapat dihindarkan, namun hal ini jika tidak dimanfaatkan secara tepat menyebabkan kemalasan akibat ketergantungan. Namun dengan menerapkan “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”, diharapkan adanya perubahan *mindset* dari ketergantungan terhadap TIK menjadi memanfaatkan TIK sebagai solusi dan sesuai fungsi yang efisien terhadap penggunaan anggaran.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Kekuatan/*Strengths*
 - i) Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah
 - ii) Tersedianya infratraktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
 - iii) Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik
 - iv) Pemanfaatan *big data* bisa dilakukan dengan beberapa *exercise* untuk memastikan posisi *big data* dan *official statistic*
- b. Kelemahan/*Weaknesses*
 - i) Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
 - ii) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
 - iii) Keterbatasan kanal diseminasi
 - iv) Keterbatasan *resources* (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia

2. Faktor Eksternal

- a. Peluang/*Opportunities*
 - i) BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
 - ii) *Big data* dan data administratif yang sangat banyak dan beragam
 - iii) Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil
 - iv) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional

- v) BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
 - vi) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
 - vii) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* tertentu
- b. Ancaman/*Threats*
- i) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data
 - ii) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas
 - iii) Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden)
 - iv) Tingginya *respondent burden* (beban responden)

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian laporan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bekasi diuraikan menurut sistematika pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan;

- Bab II. Perencanaan**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2022;
- Bab III. Akuntabilitas**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020 - 2024, Prestasi Tahun 2022, Upaya Efisiensi BPS Tahun 2022, dan Realisasi Anggaran Tahun 2022;
- Bab IV. Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2 *PERENCANAAN*

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2022

2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Bekasi 2020 – 2024

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas.

Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut.

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dengan uraian sebagai berikut.

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tabel 2.1.
Rumusan Visi dan Misi BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

VISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 -2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2020-2024 sebagai berikut.

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007).

Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (*Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187*).

Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah.

... profesionalisme ...

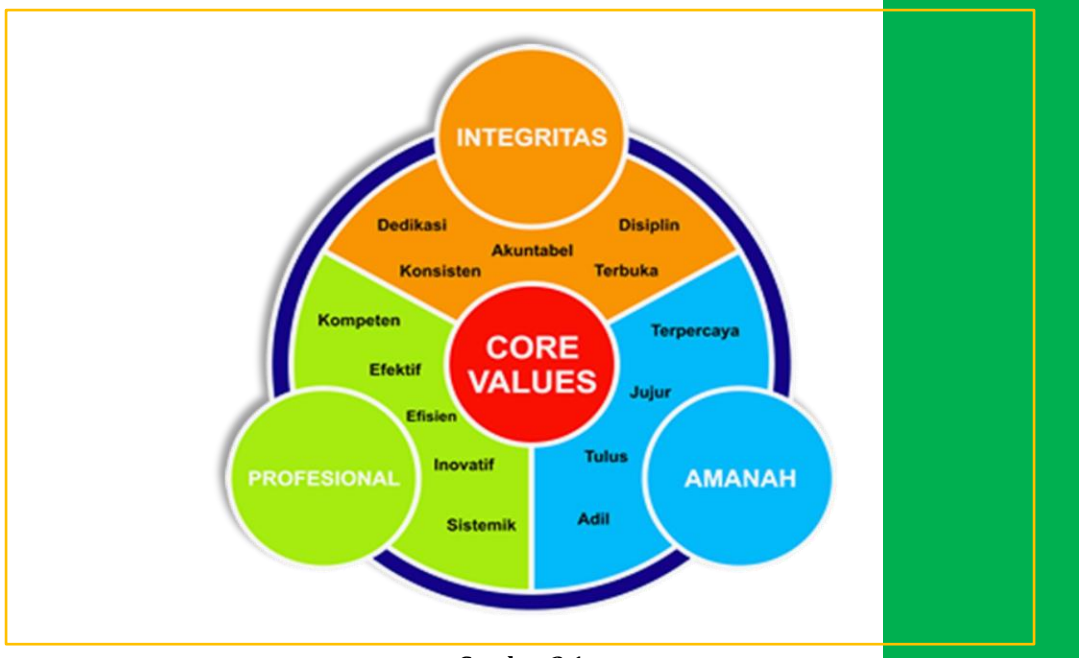
“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.



Gambar 2.1.
Nilai Inti BPS

2.2. Tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi. Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel. 2 2
Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

VISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 -2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 	

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan inernasional;

2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :

Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:

Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan

kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.3.
Indikator dan Target BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	60	65	70	75	80
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	20	25	30	35	40
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	20	24	28	32	36
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bekasi	74	74,5	75	75,5	76

2.3. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bekasi

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Kabupaten Bekasi tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kabupaten Bekasi ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen (Dukman).

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis

beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - Sosialisasi kepada masyarakat
 - Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - Membuat *customer relationship management*
 - Menyusun *data mining* pengguna data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:

- Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - Jumlah NSO yang menerima statistikal *capacity building* di BPS
 - Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Dengan indikator sasaran:

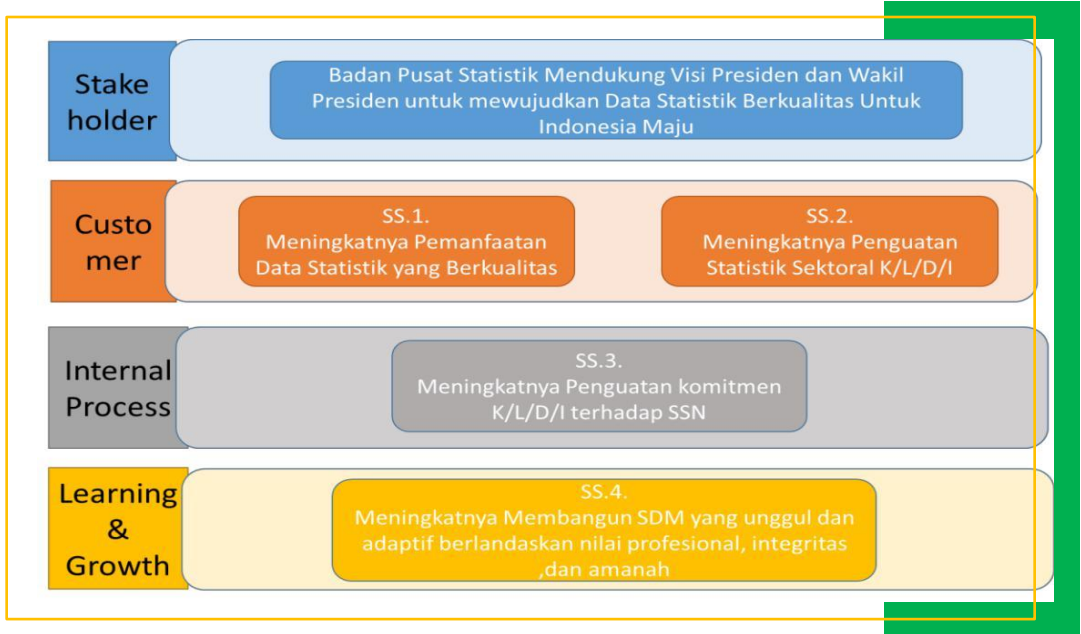
- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bekasi
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar 2.2.
Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2022 Tentang Implementasi *Core Values dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka penguatan Budaya Kerja dan transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, Indonesia telah meluncurkan Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASB “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan’
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b. Suka menolong orang lain;
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bekasi 2021

Setiap awal tahun, target yang harus dicapai selama setahun ditetapkan untuk tiap indikator tujuan dan sasaran strategis. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan adanya perubahan visi, misi dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2020 – 2024 serta adanya perubahan pada Perka IKU Badan Pusat Statistik 2020 – 2024 No.38 Tahun 2020 maka target kinerja BPS Kabupaten Bekasi pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 mengikuti tujuan, sasaran dan indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Perka IKU tersebut.

Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2021. Realisasi kinerja dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tersebut akan selalu dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan kinerja yang diukur setiap triwulanan dan pada akhir tahun secara kumulatif dilaporkan menjadi laporan kinerja tahunan.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Kabupaten Bekasi. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(5)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	95

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(5)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	17
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	80
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	80
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	80
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	74,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	Persen	95

3 *AKUNTABILITAS*

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2022

Akuntabilitas kinerja adalah tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2022. Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dijelaskan pada uraian di bawah ini.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2021

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada Tabel 2.4 sebelumnya.

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sepanjang Tahun 2022, Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Bekasi yaitu:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

NO.	TUJUAN
(1)	(2)
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Keempat tujuan tersebut memiliki indikator utama dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Nilai Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1/ S1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	S1. Presentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	56,15	59,44	111,44
T2/ S2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan	S2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	80,00	100,00	110,00
T3/ S3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	S3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persen	80,00	80,00	100,00
T4/ S4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	S4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,75	84,73	99,86
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran						106,09

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” diukur dengan sasaran indikator “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”. Indikator ini mencerminkan penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik.

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” diukur dengan sasaran indikator “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997).

BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” yang diukur dengan sasaran indikator “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri atas:

1. Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
2. Layanan konsultasi pengguna data;
3. Layanan perpustakaan tercetak;
4. Layanan perpustakaan digital;
5. Layanan penjualan buku dan;
6. Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi.

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” yang diukur dengan sasaran indikator “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah.

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

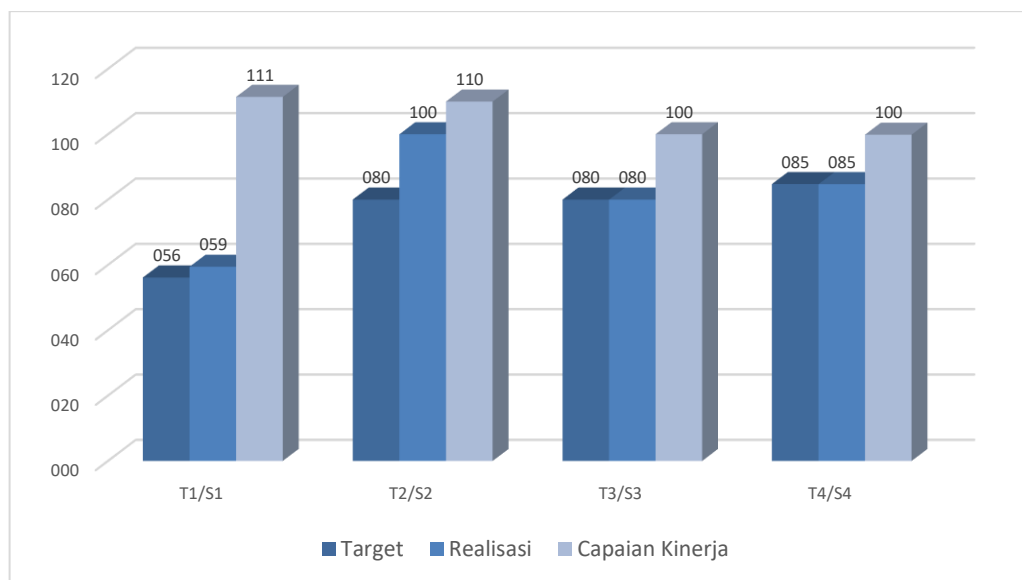
“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin

(melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.
...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Di dalam Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan pencapaian kinerja mempunyai bobot (20).

Ketercapaian realisasi terhadap target dari masing-masing tujuan disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.1.
Rata-rata Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 per Tujuan/Sasaran

Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, diukur dengan indikator Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi” dan indikator ‘Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional’. Capaian kinerja dari indikator-indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Presentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	95,00	97,73	102,87
		1.1.2. Presentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	17,00	21,00	120,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-1						111,44

Berdasarkan pada Tabel 3.3 target **tujuan pertama “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran pertama yakni “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas”** dengan indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi” adalah 95,00 persen dan realisasi capaian menunjukkan bahwa 97,73 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data BPS. Dengan demikian capaian kinerja tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” adalah sebesar 102,87 persen. Demikian halnya dengan sasaran indikator ‘Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional’ dengan target 17,00 persen dapat direalisasikan sebesar 21,00 persen, meskipun indikator ini merupakan penghitungan nilai dari rata-rata jumlah publikasi yang dihasilkan semua bidang akan tetapi sudah melampaui capaian sebesar 120,00 persen. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah terlampaui sebesar 111,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” telah tercapai dengan baik.

Secara umum, BPS Kabupaten Bekasi telah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Tim Pelaksana khususnya Pilar Penataan Tata Laksana. Tim ini bertugas untuk memastikan apakah proses pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* atau buku pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data dari survei bersangkutan.

Peningkatan kualitas data juga dilakukan dengan lebih mengaktifkan peran para pengawas dan memastikan bahwa peran yang harus diambil terlaksana dengan baik. Selama ini disinyalir bahwa peran para pengawas belum berjalan maksimal yang diindikasikan dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada tahap editing coding dan pengolahan dokumen pencacahan.

Seharusnya pengawas memastikan apakah data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum data diserahkan kepada unit pengolahan.

Kepada para petugas, sebelum melakukan pendataan juga dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan, agar lebih mahir dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam melakukan wawancara. Selain itu berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah diajarkan petugas senantiasa diingatkan bahwa dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu memperhatikan konsistensi dari data yang dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya.

Untuk melengkapi kegiatan di atas, penanggungjawab kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas. Monitoring kualitas atau pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan sedang berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil dari kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan (*coverage*) maupun isi (*content*) data yang dikumpulkan. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk dokumen pengendalian proses kegiatan.

Meski pada Tahun 2022, realisasi persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan menunjukkan peningkatan yang signifikan, tapi karena adanya pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk bergerak cepat dalam membuat kebijakan dan perencanaan. BPS mempunyai peran yang strategis dalam penyediaan data sebagai dasar perencanaan. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kendala Yang Dihadapi

- Pandemi Covid-19 sepanjang Tahun 2022 menyulitkan konsumen yang akan mencari data secara langsung ke Kantor BPS. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terjadinya penularan virus, sehingga kunjungan secara langsung ke pelayanan data BPS pun dibatasi.
- Masih belum maksimal dalam pembuatan publikasi untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.
- Data BPS belum dijadikan rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan;
- Perencanaan kegiatan yang kurang terpadu sehingga menjadi tumpang tindih saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah terbawah atau pada tingkat pelaksana lapangan;
- Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga non organik (mitra statistik), namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas;
- Belum lengkapnya identitas perusahaan dalam kerangka *sample* dan Direktori Perusahaan sehingga sering kesulitan menemukan alamat responden di lapangan;
- Sulitnya mendapat data neraca perusahaan terutama untuk usaha yang berkategori IMK, sehingga petugas menemukan kendala dalam menggali informasi terkait neraca perusahaan tersebut;
- Penerimaan responden perusahaan terhadap petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih rendah;

- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei sangat panjang, sehingga data yang dihasilkan kurang objektif;
- Kejenuhan responden, baik responden rumah tangga maupun perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan tujuan yang berbeda;
- Tidak adanya program berkelanjutan bagi mitra untuk membantu kegiatan BPS, sehingga proses transfer *knowledge* tidak berjalan dengan baik;
- Penerimaan dokumen di akhir jadwal pelaksanaan, sehingga proses pemeriksaan, *editing* dan *coding* data tidak maksimal;
- Buku pedoman dan penegasan masih sering dikoreksi dan belum dapat menjawab permasalahan lapangan;
- Pada pengolahan data seringkali aplikasi program dari BPS RI harus di update dengan beberapa kali patch baru sehingga proses pengolahan data terhambat karena perlu penyesuaian kembali.

b. Strategi Yang Dilakukan

- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Identifikasi substansi laporan pertanggungjawaban yang belum terpenuhi sehingga menjadi input bagi laporan periode mendatang;
- Secara internal melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Manajemen lapangan didesain dengan strategis dan efektif;
- Proses perekrutan petugas mitra statistik dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien;
- Pengelolaan pengiriman dan penerimaan dokumen di pusat pengolahan ditertibkan. Upayakan agar proses pengiriman data

- yang sudah selesai di tingkat petugas lapangan dilakukan bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan;
- Menyusun penegasan-penegasan yang terstruktur untuk beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman;
 - Meningkatkan efektivitas kegiatan revisit dan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi unit pendataan misalnya bekerjasama dengan BPS RI, agar memiliki kekuatan institusi lebih besar;
 - Secara aktif memberikan input bagi penyempurnaan program aplikasi pengolahan ke BPS RI pada tahap perencanaan program sehingga saat pelaksanaan pengolahan aplikasi sudah sempurna untuk dieksekusi.

c. Rencana Aksi

- Menyusun matrik jadwal kerja yang memuat beban kerja petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik;
- Melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada di wilayah kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia maupun turun langsung ke lapangan, sehingga non respon sudah diketahui secara dini;
- Meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data baik rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah;
- Identifikasi petugas mitra yang dapat dilibatkan pada kegiatan sensus maupun survei BPS dalam setiap kesempatan;
- Memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan para mitra statistik;
- Melaksanakan transformasi proses bisnis statistik dengan mengintegrasikan beberapa survei dengan objek atau tujuan yang serupa;
- Mitigasi resiko yang akan muncul pada setiap tahapan survei.

2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”, diukur dengan indikator Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan indikator Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN” Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1. Presentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	80,00	80,00	100,00
		2.1.2. Presentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	80,00	120,00	120,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-2						110,00

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian indikator sasaran dari tujuan 2 ini sebesar 110,00 persen berdasarkan hasil capaian dari 2 (dua) indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”, yakni indikator Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dengan capaian 100,00 persen, serta indikator persentase

K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar dengan nilai capaian 120,00 persen.

“Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” yang diukur dengan indikator “Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik” tentu ada permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target ini, yakni masih kurangnya pengetahuan para SKPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan. Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, maka BPS Kabupaten Bekasi berusaha lebih giat lagi untuk mensosialisasikan terkait tupoksi BPS sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator kedua “Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar” dalam hal ini metadata statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah yang bersangkutan.

Sedangkan Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pada kegiatan pemberian rekomendasi statistik dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan pembinaan statistik. Rekomendasi statistik diperlukan dengan tujuan pemeriksaan rancangan Survei Statistik Sektoral dan pemberian rekomendasi agar pada setiap survei tidak terjadi duplikasi, tepat sasaran dan tidak membebani responden, memakai metodologi/variabel yang sesuai dan sudah baku serta terkoordinir dengan baik, serta didukung oleh sistem yang baik. Kegiatan pembinaan statistik ini dapat berjalan dengan baik, hal ini merupakan hasil dari kolaborasi BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data dan Diskominfo sebagai Walidata dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data senantiasa berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bekasi (Walidata) dalam mewujudkan Satu Data

Indonesia (SDI) di lingkungan Kabupaten Bekasi. Secara bertahap dan konsisten, BPS dan Diskominfo memberikan pembinaan terkait pengelolaan statistik sektoral dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan statistik khusus. BPS dan Diskominfo juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pelaksana statistik sektoral.

Hal ini dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi salah satunya adalah Forum Satu Data Jabar. Forum ini memudahkan komunikasi terkait masalah/kesulitan apa yang dihadapi oleh para pelaksana statistik sektoral sehingga segera dapat diberikan solusi. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kendala Yang Dihadapi

- Kendala muncul karena adanya Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka, sedikit banyak menghambat proses pembinaan statistik.
- Beberapa SKPD belum mempunyai persepsi yang sama tentang metadata, sehingga instansi yang menjadi objek pendataan pengumpulan data belum semua memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Melakukan pembinaan statistik sektoral terhadap SKPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi/SKPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.

- Melalui Diskominfo, maka program pembinaan statistik dilakukan dengan pertemuan secara virtual.

c. Rencana Aksi

Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi dan instansi /SKPD dengan pelaksanaan secara virtual.

3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, diukur dengan satu indikator yakni persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. Tujuan ketiga dicapai dengan sasaran strategis penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1. Presentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	80,00	80,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-3						100,00

Target capaian dari indikator Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK mencapai 100,00 persen, karena dari target 80 persen, yang terealisasi mencapai 80,00 persen sehingga capaian kinerja menjadi 100 persen.

BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data senantiasa berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bekasi (Walidata) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Kabupaten Bekasi. Secara bertahap dan konsisten,

BPS dan Diskominfo memberikan pembinaan terkait pengelolaan statistik sektoral dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan statistik khusus. BPS dan Diskominfo juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pelaksana statistik sektoral.

Hal ini dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi salah satunya adalah Forum Satu Data Jabar. Forum ini memudahkan komunikasi terkait masalah/kesulitan apa yang dihadapi oleh para pelaksana statistik sektoral sehingga segera dapat diberikan solusi.

Masih kurangnya pengetahuan K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK untuk berkoordinasi dengan BPS. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang penting untuk ditanggulangi. Sebagai salah satu cara yang ditempuh adalah lebih mensosialisasikan tentang BPS dalam hal penyelenggaraan statistik.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan terkait, namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus.

Hal ini menjadi suatu motivasi sekaligus tantangan bagi BPS Kabupaten Bekasi untuk lebih berusaha meraih nilai yang lebih tinggi lagi melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Satu strategi yang selalu ditempuh untuk membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi/OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kabupaten Bekasi. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi

hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Kendala Yang Dihadapi

- Kendala muncul karena adanya Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka, sedikit banyak menghambat proses pembinaan statistik.
- Beberapa SKPD belum mempunyai persepsi yang sama terkait statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, sehingga instansi yang menjadi objek pendataan pengumpulan data belum semua memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Melakukan pembinaan statistik sektoral terhadap SKPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi/SKPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Melalui Diskominfo, maka program pembinaan statistik dilakukan dengan pertemuan secara virtual.

c. Rencana Aksi

Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi dan instansi /SKPD dengan pelaksanaan secara virtual.

4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, dengan sasaran “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” diukur dengan satu indikator yakni Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Capaian

kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,50	73,74	98,98
		4.1.2. Presentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	95,00	95,71	100,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-4						99,86

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel merupakan salah satu dari tujuan rencana strategis BPS Kabupaten Bekasi mulai dari menyempurnakan sistem penguatan akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Dengan penguatan

akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.6, tujuan keempat dicapai dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis , yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator pertama dari tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah seluruh bagian dan fungsi di lingkungan BPS Kabupaten Bekasi. Sumber datanya berasal dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.

BPS Kabupaten Bekasi seperti tahun sebelumnya selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Keberhasilan BPS Kabupaten Bekasi dalam pemenuhan SAKIP diukur berdasarkan penilaian SAKIP oleh Inspektorat baik melalui *Desk Evaluation* maupun *Field Evaluation*.

Berdasarkan peningkatan nilai SAKIP beberapa tahun belakangan, maka BPS Kabupaten Bekasi telah menargetkan nilai SAKIP pada Tahun 2022 sebesar 74,5 point dengan realisasi 73,74 point dengan capaian kinerja sebesar 98,98 persen. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat telah dijadikan acuan dalam memperbaiki manajemen SAKIP di Kabupaten Bekasi, terutama dalam hal perbaikan data kinerja mulai tahap perencanaan sampai tahap pengukuran, seperti pemenuhan dan kelengkapan prasyarat beberapa indikator, dan perbaikan SOP pengumpulan data kerjanya akan tetapi dalam hal inovasi BPS Kabupaten Bekasi masih perlu menciptakan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pelayanan.

Pada indikator kedua dalam sasaran SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan yakni Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS mengalami sedikit kenaikan. Di Tahun 2022 kondisi Pandemi Covid19 masih berlangsung, sehingga kunjungan langsung dialihkan menjadi pelayanan secara

online. Kondisi ini membuat BPS Kabupaten Bekasi melakukan inovasi atau strategi baru guna meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung di ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) meskipun secara online..

Di Tahun 2022 persentase hasil penilaian masyarakat terhadap kepuasan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di BPS Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan target 95.00 persen dan realisasi sebesar 95,71 dengan kata lain capaian kinerja yang dihasilkan dari tingkat kepuasan sarana dan prasarana ini hanya mencapai 100,75 persen.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kendala Yang Dihadapi

- Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 menyulitkan konsumen yang akan mencari data secara langsung ke Kantor BPS. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terjadinya penularan virus, sehingga kunjungan secara langsung ke pelayanan data BPS pun dibatasi.
- Indikator yang telah ditetapkan BPS Pusat belum semuanya dianggap SMART;
- Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum standar antar pemeriksa dan tidak semua dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Penilaian kepuasan terhadap sarana prasarana perlu ditinjau ulang dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang berkembang. Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.

- Melakukan pembinaan dari BPS Pusat khususnya Biro Bina Program dan Inspektorat, untuk mengadakan pembinaan SAKIP agar terjadi kesamaan persepsi tentang konsep definisi dan standar sumber data;
- Evaluasi SAKIP oleh inspektorat dapat diimplementasikan dengan mudah oleh Daerah agar dapat di tindak lanjuti.

c. Rencana Aksi

- Melakukan pembinaan SAKIP dengan mengundang BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi sebagai pembimbing dan narasumber, juga turut mengundang Tim dari Biro Perencana BPS dan Inspektorat BPS dalam acara Refreshing SAKIP setiap awal tahun;
- Melakukan *field evaluation* terhadap kabupaten/kota secara berkala sehingga laporan kinerja menjadi lebih baik.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2020 pada dasarnya tidak dapat di bandingkan karena memiliki tujuan, sasaran strategis dan indikator yang berbeda, sebagai akibat adanya perubahan Visi, Misi BPS selaras dengan Rencana Strategis 2020-2024 serta IKU perka no.38 Tahun 2020. Namun dapat dianalisa keterbandingan pencapaian hasil akhir kinerjanya berdasarkan tampilan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020

Tujuan	Sasaran/Indikator	satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatkan Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	31,50	50,69	110,00
	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60,00	98,04	120,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	3,00	3,33	100,00
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	43,50	45,84	110,00
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	67,00	66,67	100,00
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	20,00	25,00	120,00
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	20,00	80,00	120,00
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20,00	80,00	120,00
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,50	74,91	89,85
	4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	74,00	73,61	99,47
	4.2.1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	95,00	76,21	80,22
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran					107,46

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tahun 2020 dalam kurun waktu lima tahun Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 dapat dikategorikan cukup baik dilihat dari pencapaian dari tiap-tiap indikator yang ada sebagaimana dijabarkan di tabel di atas. Sekalipun ada beberapa indikator yang belum mencapai nilai sesuai target sebagai dampak dari kondisi dan permasalahan yang ditemui di

lapangan, namun dengan berbagai upaya maka permasalahan tersebut dapat diatasi, dan rata-rata capaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 mencapai 107,46 persen.

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Tujuan	Sasaran/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	56,15	59,44	111,44
	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	95,00	97,73	102,87
	1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	17,00	21,00	120,00
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	80,00	100,00	110,00
	2.1.1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	80,00	80,00	100,00
	2.1.2. Presentase K/L/D/I yang menyampaikan metadada sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	80,00	120,00	120,00
T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	80,00	80,00	100,00
	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	80,00	80,00	100,00
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,75	84,73	99,86
	4.1.1 . Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,50	73,74	98,98
	4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	Persen	95,00	95,71	100,75
Rata-rata Capaian Kinerja Tjuan/Sasaran					106,09

Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk rentang Renstra 2020-2024 sudah termasuk baik karena di atas 100 persen, yaitu sebesar 106.09 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2020, pencapaian kinerja di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,37 persen. Sehingga masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3.3. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi terhadap target Renstra 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi
Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021

Tujuan	Sasaran/ Indikator	Satuan	Target Renstra					Realisasi	Capaian Terhadap Target Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)				
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	31,5	34	36,5	39	41,5	59,44	110	111,44			
	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60	65	70	75	80	97,73	120	102,87			
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan,	Persen	3	3	3	3	3	21	100	120,00			
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	100	110	110			
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	67	67	67	67	67	80	100	100			

	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadana sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	20	20	20	20	20	120	120	120			
T.3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	20	24	28	32	36	80	120	100			
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20	24	28	32	36	80	120	100			
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,5	84,75	85	85,25	85,5	84,73	89,85	99,86			
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	74	74,5	75	75,5	76	73,74	99,47	98,98			
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	95	95	95	95	95	95,71	80,22	100,75			

Pada tabel diatas, dapat dilihat capaian realisasi Tahun 2022 terhadap target Renstra 2021. Nilai capaian yang diperoleh pada tiap-tiap indikator adalah sebagian besar melebihi nilai yang ditargetkan, meski ada satu indikator yang belum mancapai target, namun tetap optimis untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan ditahun mendatang dengan lebih baik demi meningkatkan kinerja dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran di Tahun 2022 ini merupakan pencapaian kinerja yang cukup baik yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3.4. Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Bekasi

Selama Tahun 2022, BPS Kabupaten Bekasi telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka menyesuaikan dan memenuhi setiap kebutuhan anggaran sebanyak 10 kali dari DIPA Awal. Dasar hukum dilakukannya Revisi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2020 Tanggal 18 Desember 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.018597/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. **52.574.222.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

1. **Revisi ke-1** dilakukan di DJA, tanggal Pengesahan 19 Februari 2021 dilakukan berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor B-025/01000/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2022, seluruh satker ditugaskan untuk meneliti kembali kesesuaian anggaran dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat perubahan Dasar hitung karena perubahan sampel dan Penghematan Anggaran akibat Pandemi Covid-19. Terjadi penurunan pagu anggaran sebesar **Rp. 7.323.638.000,-** , sehingga Pagu Anggaran menjadi **Rp. 45.250.584.000,-**
2. **Revisi ke-2** dilakukan di DJPB, tanggal Pengesahan 7 April 2021 sesuai Surat Kepala BPS Kabupaten Bekasi Nomor : B-016/BPS/32511/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi DIPA Antar Satker dalam rangka pemindaahan anggaran dari BPS Provinsi ke BPS

Kabupaten/ Kota se Kabupaten Bekasi. Revisi ke-2 ini mengurangi anggaran sebesar **Rp. 4.542.909.000,-** . Sehingga Pagu anggaran turun menjadi **Rp. 40.707.675.000,-**

3. **Revisi ke-3** dilakukan di DJA, tanggal Pengesahan 10 Juni 2021 berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-106/01000/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2021. Terdapat perubahan Dasar Hitung Anggaran SP Long Form. Pengurangan anggaran sebesar Rp. **2.782.785.000,-**, sehingga Total Pagu anggaran menjadi **Rp. 37.924.890.000,-**
4. **Revisi ke-4** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 8 Juli 2021, berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No. B-030/BPS/32511/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran. Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan revisi Interpolasi Pengadaan ACP. Revisi ini tidak menyebabkan anggaran berubah, sehingga Total Pagu anggaran sebesar **Rp. 37.924.890.000,-**
5. **Revisi ke-5** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 28 Juli 2021. Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2022. Revisi ini terkait Refocusing Anggaran Tahun 2022 dan Penghentian Kegiatan Long Form SP2020 pada Tahun 2022. Terjadi pengurangan anggaran sebesar **Rp. 9.280.559.000,-** sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 28.644.331.000,-**
6. **Revisi ke-6** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 12 Agustus 2021. Berdasarkan Surat dari Kepala BPS No. : B-224/01000/PR.440/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2022 Tahap IV. Revisi ini juga dilakukan terkait penyesuaian Belanja Pegawai sesuai Kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Revisi ini menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp. 1.646.124,-** sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp. 26.998.207.000,-**
7. **Revisi ke-7** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 8 Oktober 2021. Berdasarkan Surat dari Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor : B-

473/02000/PR.400/09/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran BPS Tahun Anggaran 2021. Revisi ini dilakukan terkait Optimalisasi Anggaran Tahun 2022, diantaranya pergeseran belanja 52 (Barang) ke Belanja 53 (Modal) yang mendukung kegiatan teknis. Revisi ini menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp. 3.036.000,-** sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp. 26.995.171.000,-**

8. **Revisi ke-8** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 29 November 2021. Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No. B-063/32511/PR.700/11/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi dilakukan terkait Kekurangan Uang Makan BPS Kabupaten Tasikmalaya dan Revisi Belanja Pegawai ke Belanja Barang Operasional. Revisi Antar Satker ini menyebabkan anggaran turun sebesar **Rp. 55.000.000,-**, sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 26.940.171.000,-**
9. **Revisi ke-9** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 4 Desember 2021. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-1111/02100/PR.440/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Survei Efektifitas Program Bantuan Sosial Desember 2021. Revisi DIPA terkait kegiatan Survei Efektifitas Program Bantuan Sosial Desember 2021 bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dan realokasi anggaran satker Sekretariat Utama BPS. Revisi ini tidak menyebabkan perubahan anggaran, sehingga pagu anggaran tetap sebesar **Rp. 26.940.171.000,-**
10. **Revisi ke-10** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 28 Desember 2021 merupakan revisi yang dilakukan berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No. B-069/32511/PR.700/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional. Revisi dilakukan terkait Pemutakhiran POK, kebutuhan Belanja Pegawai Gaji dan Pengawasan ke BPS Kabupaten/Kota. Revisi ini tidak menyebabkan

perubahan anggaran, sehingga pagu anggaran tetap sebesar **Rp. 26.940.171.000,-**

Secara total sejak DIPA Awal sampai DIPA Revisi ke-10 dilakukan, terjadi pengurangan anggaran sebesar **Rp. 25.634.051.000,-** .

Tabel 3.10.
Rincian Anggaran A

Uraian	2021	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0.-	0.-
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.-	0.-
Pendapatan Lain-Lain	0.-	0.-
Jumlah Pendapatan	0.-	0.-
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	14.803.546.000.-	15.045.041.000.-
BELANJA BARANG	37.644.976.000.-	8.597.344.000.-
BELANJA MODAL	125.700.000.-	3.297.786.000.-
Jumlah Belanja	52.574.222.000.-	26.940.171.000.-

Tabel 3.11.
Rincian Anggaran B

Uraian	2021	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen	18.342.304.000.-	19.378.656.000.-
BELANJA PEGAWAI	14.803.546.000.-	15.045.041.000.-
BELANJA BARANG	3.443.058.000.-	3.565.340.000.-
BELANJA MODAL	95.700.000.-	768.275.000.-
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	34.231.918.000.-	7.561.515.000.-
BELANJA BARANG	34.201.918.000.-	5.032.004.000.-
BELANJA MODAL	30.000.000.-	2.529.511.000.-
Jumlah Belanja	52.574.222.000.-	26.940.171.000.-

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, dibanding tahun 2020, BPS Kabupaten Bekasi telah berhasil menghemat penggunaan anggaran di Tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Efisiensi Program Dukungan Manajemen

No.	Kegiatan/ Pekerjaan	Nilai Realisasi 2020 (Rp)	Nilai Realisasi 2021 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas	322.992.829.-	271.704.356.-	Perawatan kendaraan dinas dan pemakaian BBM kendaraan dinas mengalami penurunan akibat pegawai melakukan pekerjaan dari rumah dengan jadwal WFH dan WFO secara bergantian sebagai dampak pandemi covid-19.
2.	Belanja Langganan Listrik	278.648.578.-	259.597.808.-	Karena Pegawai banyak melakukan pekerjaan dari rumah dengan jadwal WFH dan WFO secara bergantian sebagai dampak pandemic covid-19, penggunaan listrik terutama dalam pemakaian Komputer juga berkurang.
3.	Belanja Langganan Telepon	5.453.011.-	4.820.247.-	Karena Pegawai banyak melakukan pekerjaan dari rumah dengan jadwal WFH dan WFO secara bergantian sebagai dampak pandemic covid-19, penggunaan telepon juga berkurang.
4.	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	157.596.135.-	76.550.175.-	Biaya keperluan swab pegawai dan penyemprotan disinfektan gedung kantor mengalami penurunan sebagai dampak menurunnya kasus penderita covid-19,.
5	Belanja Keperluan Perkantoran	109.312.860,-	102.633.062,-	Belanja keperluan perkantoran seperti pembelian barang-barang ekstrakontabel mengalami penurunan sebagai dampak pandemic covid-19
6	Belanja Bahan	143.603.478,-	92.266.450,-	Belanja Bahan seperti belanja konsumsi rapat, biaya fotocopy dan penjiilidan mengalami penurunan sebagai dampak pandemic covid-19

Anggaran yang di efisiensi dari program DMPTT tersebut, dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain yang masih mengalami kekurangan anggaran. Setiap tindakan efisiensi yang dilakukan sudah diuji, dihitung, dan terutama

disetujui oleh pimpinan dengan melalui berbagai pertimbangan, sehingga anggaran tersebut boleh benar-benar terserap dan dimanfaatkan dengan *output* yang tepat.

3.5 Kinerja Anggaran Tahun 2021

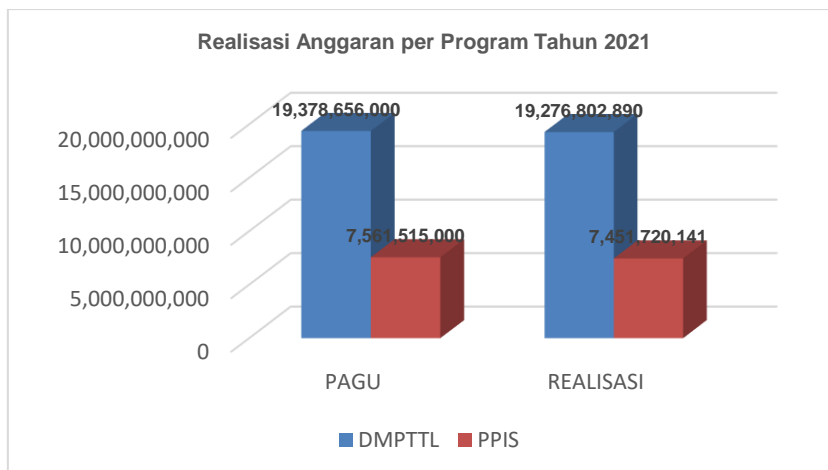
Pagu yang diberikan ke BPS Kabupaten Bekasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama Tahun 2022 adalah Rp 26.940.171.000.- terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	19.378.656.000.-	19.276.802.890.-	99,47
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	7.561.515.000.-	7.451.720.141.-	98,55
Total	26.940.171.000.-	26.728.523.031.-	99,21

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 99,47 persen dari pagu anggaran program DMPTTL, dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 98,55 persen dari pagu anggaran program PPIS.

Penyerapan anggaran Tahun 2022 berdasarkan program disajikan juga pada grafik berikut ini.



Gambar 3.2.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 Per Program

Dibandingkan dengan tahun 2020 dari total pagu sebesar Rp. 28.699.313.000.-, anggaran yang terserap sebesar Rp. 26.046.073.577.- atau sebesar 90,76 persen. Di Tahun 2022 ini, BPS Kabupaten Bekasi bertanggung jawab atas pagu yang lebih kecil, yaitu Rp. 26.940.171.000,- dan menyerap anggaran sebesar Rp.26.728.523.031.-

Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran Tahun 2022 berdasarkan Sasaran Strategis.

Tabel 3.14.

Anggaran Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS1.1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	7.510.295.000.-	7.402.529.182,-	107.765.818.-	98,57 %
SS2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	30.100.000.-	28.694.159.-	1.405.841.-	95,33 %
SS3.1. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	21.120.000.-	20.496.800.-	623.200.-	97,05 %
SS4.1.SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	19.378.656.000.-	19.276.802.890 .-	101.853.110.-	99,47 %
JUMLAH	26.940.171.000.-	26.728.523.031.-	211.647.969.-	99,21 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terbesar diserap oleh Sasaran Strategis ke empat yakni SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan mencapai 99,47 persen. Dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.378.656.000,- dapat terserap Rp. 19.276.802.890.- Meski pencapaian targetnya tidak memenuhi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa akibat pandemi Covid 19 belanja DMPTTL dialihkan untuk belanja penanggulangan Covid 19, sehingga pencapaian kinerja tidak setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sebaliknya, realisasi terendah berada di Sasaran Strategis kedua yakni Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN yang hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 28.694.159.- dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.100.000.- Kurangnya penyerapan anggaran pada sasaran strategis ini menggambarkan pula kenyataan dimana masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan OPD tentang penyelenggaraan statistik serta pemahamannya terkait posisi BPS sebagai satker pembina statistik yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh K/L/D/I. Walaupun demikian, pencapaian target untuk sasaran strategis kedua ini dengan indikator utama persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, bisa mencapai 110 persen.

Hal itu merupakan usaha dari BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data senantiasa berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bekasi (Walidata) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Kabupaten Bekasi. Secara bertahap dan konsisten, BPS dan Diskominfo memberikan pembinaan terkait pengelolaan statistik sektoral dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan statistik khusus. BPS dan Diskominfo juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pelaksana statistik sektoral. Hal ini dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi salah satunya adalah Forum Satu Data Jabar. Forum ini memudahkan komunikasi terkait masalah/kesulitan apa yang dihadapi oleh para pelaksana statistik sektoral sehingga segera dapat diberikan solusi.

Tabel 3.15.
Presentase Efisiensi Menurut Sasaran Program, Capaian Kinerja, dan

Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

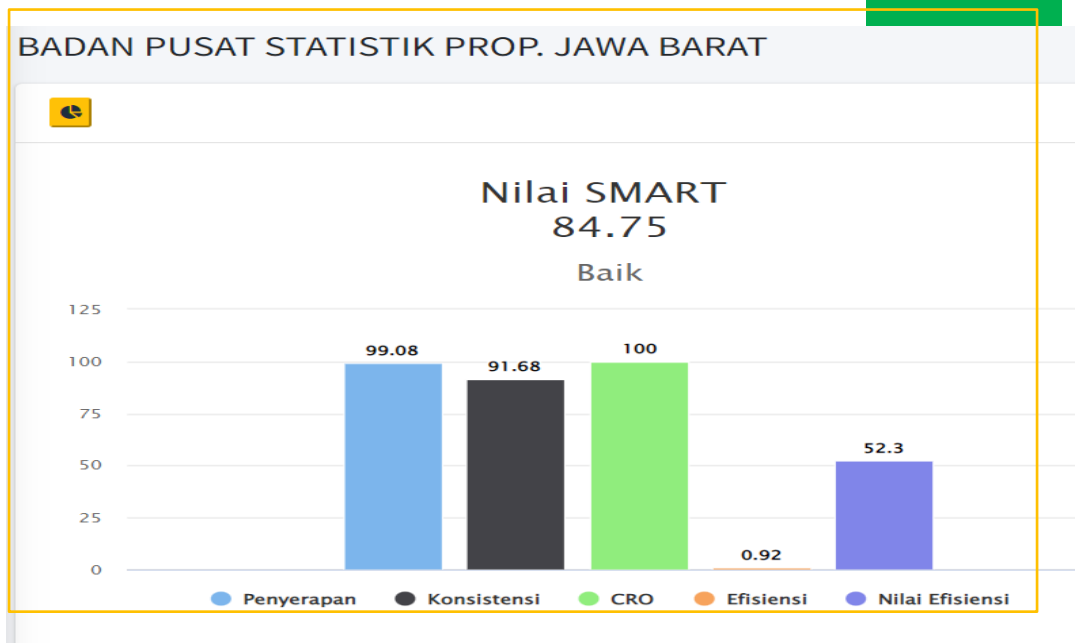
Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	111,44	7.402.529.182,-	98,57	11,55
SS2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110,00	28.694.159,-	95,33	13,34
SS3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	100,00	20.496.800,-	97,05	2,95
SS4.1.SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	99,86	19.276.802.890,-	99,47	0,39
Rata-Rata	106,09	26.728.523.031,-	99,21	7,27

Berdasarkan tabel 3.15 diatas, capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi sangatlah efektif dan efisien. Ada 3 (tiga) sasaran kegiatan dapat tercapai dengan maksimal yaitu sasaran Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas, Sasaran Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dan Sasaran Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I.

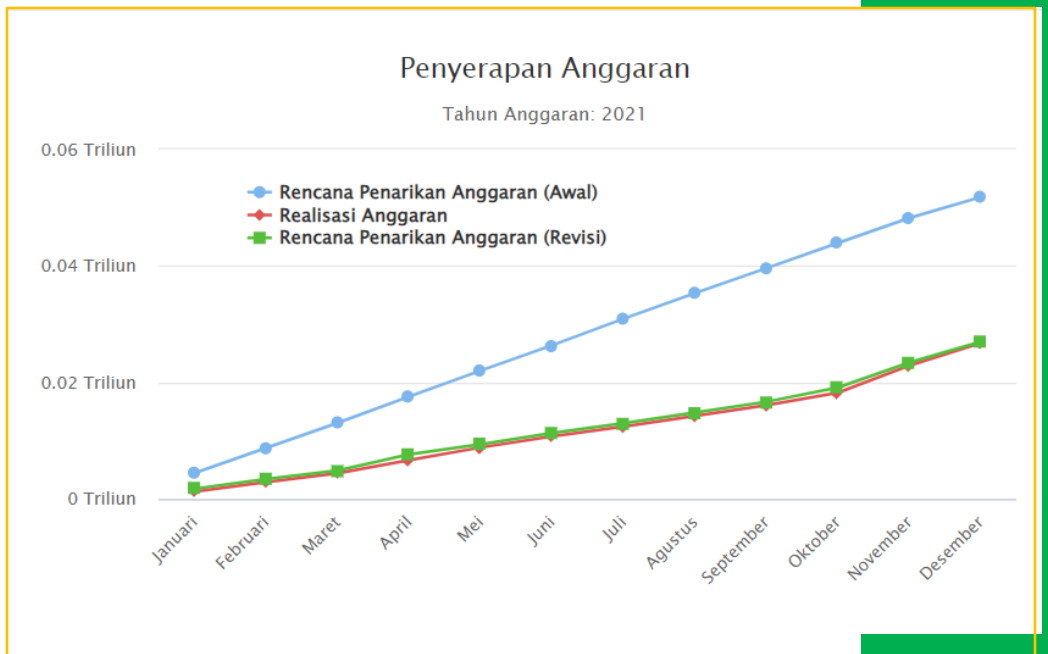
Seluruh capaian kinerja secara menyeluruh kegiatan BPS Kabupaten Bekasi capaian kerjanya secara rata-rata dapat melebihi target hingga 106,09 persen dengan serapan anggaran rata-rata 99,21 persen dan tingkat efisiensi anggaran menurut sasaran mencapai 7,27 persen. Meski demikian ada satu sasaran yang perlu mendapat perhatian yakni sasaran SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan capaian kinerja 99,86 persen dan daya serap anggaran sebesar 99,47 persen, sehingga mengakibatkan efisiensi sebesar 0,39 persen.

Tingkat efisiensi menurut aplikasi SMART yang dikelola oleh Subdit Teknologi Informasi Penganggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, juga menunjukkan hal yang cukup positif. Berdasarkan *dashboard* pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/> tingkat efisiensi BPS Kabupaten Bekasi rata-rata sebesar 0,92 persen dengan capaian kinerja sebesar 84,75 persen. Hasil

tersebut menunjukkan tingkat efisiensi terhadap tercapainya target output cukup baik jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.



Gambar 3.3.
Nilai SMART BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022



Gambar 3.4.
Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Belanja Operasional merupakan total anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ditambah Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang ada di program DMPTTL. Dari total pagu Program DMPTTL sebesar Rp.19.378.656.000,- anggaran Belanja Operasional adalah sebesar Rp. 17.770.900.000,- yang terserap adalah sebesar Rp. 17,707.069.885,- atau sebesar 99,64 persen dengan efisiensi 0,36 persen. Sedangkan, untuk belanja non operasional adalah keseluruhan total anggaran yang ada di program PPIS ditambah belanja non operasional di program DMPTTL dengan total pagu belanja non operasional adalah Rp. 9.169.271.000,- dan anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 9.021.453.146,- atau sebesar 98,39 persen dengan efisiensi sebesar 1,61 persen.

Tabel 3.16.
Realisasi Pagu Menurut Jenis Belanja TA 2021

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi/ Pagu (%)	Efisiensi (100 – Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operasional	17.770.900.000.-	17,707.069.885.-	99,64	0,36
Non Operasional	9.169.271.000.-	9.021.453.146.-	98,39	1,61

Tabel 3.17.
**Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bekasi
Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2022**

Program / Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Realisasi/ Pagu (%)	Kontribusi terhadap Realisasi Total	Efisiensi (100 – Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DMPTTL	19.378.656.000.-	19.276.802.890.-	99,47	72,12	0,53
PPIS	7.561.515.000.-	7.451.720.141.-	98,55	27,88	1,45
Total	26.940.171.000.-	26.728.523.031.-	99,21	100,00	0,79

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Program DMPTTL menyumbang realisasi lebih banyak daripada Program PPIS yang hanya memberikan 27,88 persen kontribusi terhadap realisasi dari total anggaran Tahun 2022. Pengelolaan anggaran yang baik harus didukung pula dengan perencanaan yang matang. Hal ini masih menjadi poin penting yang perlu mendapat perhatian bukan hanya dari pimpinan tetapi juga dari masing-masing *subject matter*. Sejalan dengan aktifitas dan kegiatan di lapangan yang telah dijadwalkan, anggaran pun harus di kelola dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terserap dengan baik pula sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Bekasi pada Tahun 2022 mencakup beberapa kegiatan prioritas nasional yaitu sebagai berikut.

3.6.1. KEGIATAN PRA PEMUTAKHIRAN LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020

Kegiatan SP2020 dilaksanakan ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan *short form* dan instrumen lainnya pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan *long form* pada Tahun 2022. Namun adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 kegiatan LF SP2020 pada Tahun 2022 dihentikan pada tanggal 8 Juli 2021.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021, dilakukan *Video Conference* antara BPS dengan BPS provinsi se-Indonesia. Vicon ini membahas terkait agenda kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020. Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020 dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan LF SP2020 pada tahun 2022. Kegiatan lapangan semula direncanakan pada tanggal 17 -31 Oktober, kemudian diperpanjang menjadi 17 Oktober- 10 November 2021.

Kegiatan pra pemutakhiran LF SP2020 di Kabupaten Bekasi diawali dengan identifikasi blok sensus, rekrutmen petugas, briefing instruktur, briefing petugas, pengalokasian wilayah tugas, pelaksanaan lapangan, monitoring dan evaluasi. Dalam setiap tahapan, tidak lepas dari adanya kendala dan permasalahan. Penyelesaian kendala dan masalah pun dilakukan dengan berbagai upaya.

Petugas lapangan direkrut oleh BPS kabupaten/kota. Banyaknya petugas lapangan pra pemutakhiran *Long Form* SP2020 yang direkrut didasarkan kepada alokasi beban tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Jumlah petugas yang direkrut lebih banyak daripada kebutuhan. Pelaksanaan rekrutmen petugas dilakukan baik secara online maupun tatap muka, disesuaikan dengan kondisi di kabupaten/kota.

Tabel Penyesuaian Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020

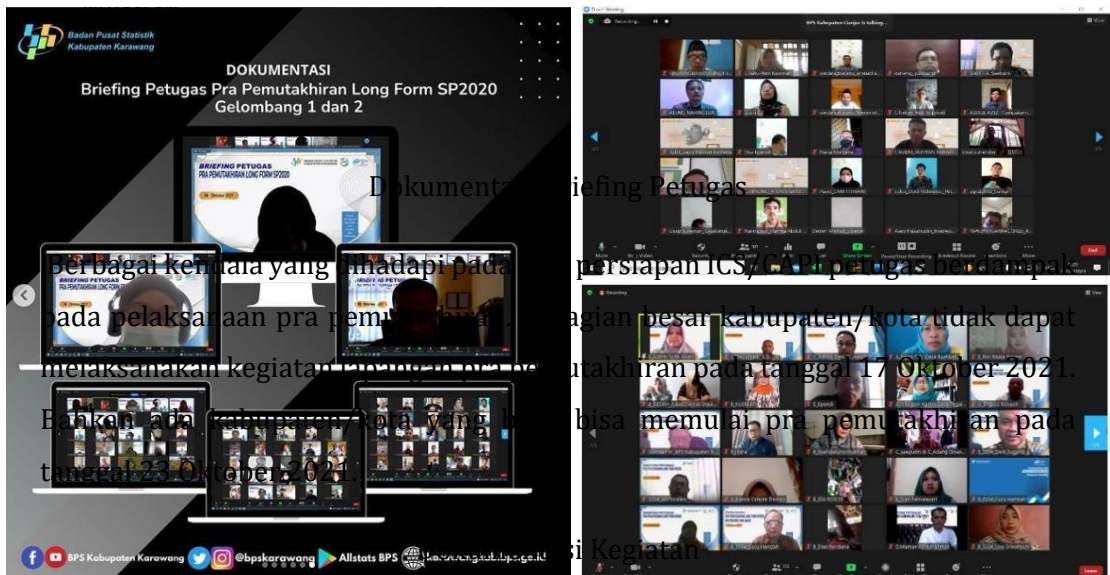
Kabupaten/Kota		Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas (Revisi)				
		Blok Sensus	Petugas	Pemeriksa	Koseka	Total Petugas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3216	Bekasi	665	163	35	7	205

Swab Antigen merupakan salah satu persyaratan calon petugas menjadi petugas pra pemutakhiran LF SP2020. Calon petugas yang dinyatakan negatif berhak untuk menjadi petugas, adapun yang positif tidak mengikuti tahapan selanjutnya. Bagi kabupaten/kota yang ternyata terdapat calon petugas positif, maka melakukan tes kembali kepada calon petugas cadangan hasil rekrutmen.

Kegiatan Swab Antigen



Kegiatan Briefing Petugas Pra Pemutakhiran LF SP2020





Beberapa Isu Metodologi yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Muatan BS > 1000 KK

Terdapat 8 Blok Sensus yang memiliki muatan lebih dari 1.000 KK, yaitu di Kabupaten Garut. Adapun di wilayah lainnya tidak ditemukan kasus 1 BS > 1000 KK.

b. BS Tidak Ada Muatan

Terdapat 9 BS di Kabupaten Bandung yang bermuatan kosong, yaitu asrama mahasiswa Universitas Telkom. Di kabupaten/kota lain juga ditemukan BS dengan muatan kosong, yaitu di kawasan terminal, pasar, dan pusat pertokoan.

c. BS yang mayoritas prelistnya merupakan penduduk BS lain (lebih dari 30%)

Kasus BS yang mayoritas prelist merupakan penduduk BS lain (lebih dari 30%) ditemukan di hampir semua kabupaten/kota.

Target dan Realisasi Progres Lapangan

Kabupaten/Kota	Target BS	BS Selesai	% BS Selesai	BS Sedang	% BS Sedang	BS (Sudah+ Sedang)	% BS (Sudah+ Sedang)
Bogor	856	856	100,00	0	0,00	856	100,00
Sukabumi	521	521	100,00	0	0,00	521	100,00
Cianjur	530	530	100,00	0	0,00	530	100,00
Bandung	550	550	100,00	0	0,00	550	100,00
Garut	458	458	100,00	0	0,00	458	100,00
Tasikmalaya	428	428	100,00	0	0,00	428	100,00
Ciamis	320	320	100,00	0	0,00	320	100,00
Kuningan	293	293	100,00	0	0,00	293	100,00
Cirebon	487	487	100,00	0	0,00	487	100,00
Majalengka	306	306	100,00	0	0,00	306	100,00
Sumedang	330	330	100,00	0	0,00	330	100,00
Indramayu	444	444	100,00	0	0,00	444	100,00
Subang	415	415	100,00	0	0,00	415	100,00
Purwakarta	297	297	100,00	0	0,00	297	100,00
Karawang	542	542	100,00	0	0,00	542	100,00
Bekasi	665	665	100,00	0	0,00	665	100,00
Bandung Barat	409	409	100,00	0	0,00	409	100,00
Pangandaran	188	188	100,00	0	0,00	188	100,00
Kota Bogor	206	206	100,00	0	0,00	206	100,00
Kota Sukabumi	136	136	100,00	0	0,00	136	100,00
Kota Bandung	409	409	100,00	0	0,00	409	100,00
Kota Cirebon	161	161	100,00	0	0,00	161	100,00
Kota Bekasi	486	486	100,00	0	0,00	486	100,00
Kota Depok	408	408	100,00	0	0,00	408	100,00
Kota Cimahi	174	174	100,00	0	0,00	174	100,00
Kota Tasikmalaya	215	215	100,00	0	0,00	215	100,00
Kota Banjar	128	128	100,00	0	0,00	128	100,00
JAWA BARAT	10362	10362	100,00	0	0,00	10362	100,00

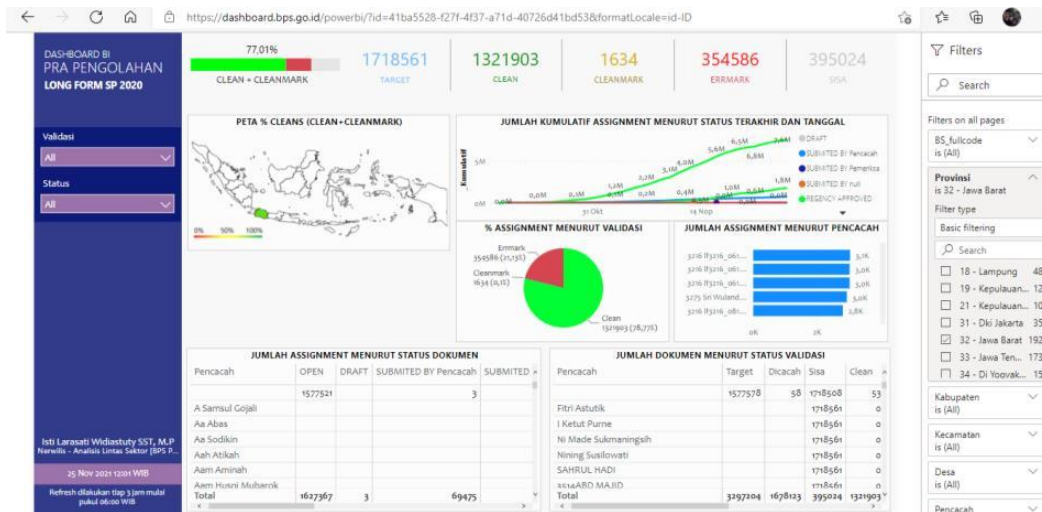
Sumber : monpra_p

Monitoring Berdasarkan Dashboard Pra Pemutakhiran LF SP2020

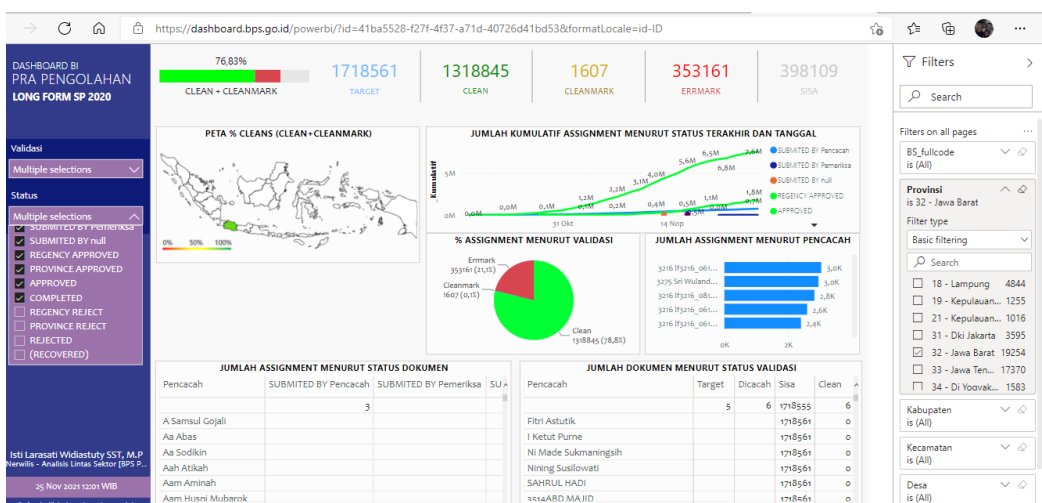
Realisasi Pengolahan Pra Pemutakhiran LF SP2020 (*dashboard*)

Tanggal : 25 November 2021, pukul 12.00

Target jumlah rumah tangga (*record* pada ICS) sebanyak 1.718.561, yang sudah masuk ke server dengan status dokumen *Draft, Open, Submitted, Approve, Regency Approve, Completed* sebanyak 77,01 persen



Target jumlah rumah tangga (*record* pada ICS) sebanyak 1.718.561, yang sudah masuk ke server dengan status dokumen *Submitted, Approve, Regency Approve, Completed* sebanyak 76,83 persen



3.6.2 SURVEI STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi penyedia data berupaya menunjang keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata dengan menyediakan data yang dapat digunakan untuk mendukung evaluasi dan monitoring program pengembangan pariwisata. BPS berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi terkait kegiatan perjalanan wisatawan nusantara beserta semua aspek secara rinci, cermat, dan tepat waktu. Di era digital seperti saat ini, tuntutan modernisasi di berbagai sektor menjadi sebuah keharusan, termasuk di dalam *official statistics*. Selain itu, adanya wabah Covid-19 juga turut mempercepat proses transformasi digital tersebut. Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata, bersama dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik dan Direktorat Metodologi terus berupaya untuk melakukan inovasi dengan menyesuaikan antara kebutuhan data dengan kemajuan teknologi terkini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh BPS yaitu penggunaan metode *Mobile Positioning Data* (MPD) yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

Selama ini, Statistik Wisatawan Nusantara tersedia melalui kegiatan pengumpulan data Survei Wisatawan Nusantara dengan sampel rumah tangga (konvensional). Namun, terdapat beberapa keterbatasan dari pengumpulan data Survei Wisatawan Nusantara pada rumah tangga, yaitu hasil survei hanya dapat digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dan hasilnya sangat tergantung pada daya ingat responden. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dari sisi jawaban responden, disamping potensi kesalahan dalam pengambilan sampel survei. Keterbatasan yang ada, mendorong kegiatan eksplorasi alternatif sumber data lain untuk penyusunan publikasi Statistik Wisatawan Nusantara.

Sejak tahun 2016, BPS telah mulai melakukan eksplorasi pemanfaatan Big Data melalui MPD sebagai sumber data lain dalam penyusunan statistik pariwisata secara umum. MPD merupakan salah satu metode penghitungan jumlah wisatawan nusantara dengan pendekatan posisi para pengguna SIM card dari operator di Indonesia. Dengan merujuk kepada referensi dan literatur akademik yang ada, data MPD tersebut dapat diolah yang selanjutnya dapat diklasifikasikan menurut

kebiasaannya, mulai dari wisatawan nusantara hingga commuter. Pemanfaatan MPD terus dilakukan pengembangan dan kini dimanfaatkan sebagai data penyusun publikasi Statistik Wisatawan Nusantara 2021. Sesuai perkembangan teknologi, ketersediaan *Big Data* terbukti berpeluang untuk dijadikan sumber data pendukung dalam penyusunan statistik resmi.

Dengan adanya perubahan metode pengumpulan data untuk Statistik Wisatawan Nusantara, maka diperlukan kegiatan Penjaminan Kualitas Data Wisatawan Nusantara MPD Tahun 2022 melalui mekanisme relawan yang akan dilakukan oleh pegawai organik BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota tertentu. Hal ini dilakukan sebagai *field confirmation* antara data MPD yang diperoleh dengan realita di lapangan, sehingga diharapkan *official statistics* yang dihasilkan melalui MPD akurat karena melalui beberapa tahapan verifikasi. Oleh sebab itu, setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara optimal, mulai dari proses rekrutmen, briefing, pengisian lembar kerja relawan, hingga supervisi kegiatan.

Kegiatan Penjaminan Kualitas Data Wisatawan Nusantara MPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan jadwal dan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyiapan Mekanisme Pelaksanaan	M1 Juli - M1 Agustus 2021
2	Penyiapan Instrumen Kegiatan	M3 Juli - M1 Agustus 2021
3	Rekrutmen Relawan	M1 Agustus 2021
4	<i>Briefing</i> Relawan	10 Agustus 2021
5	Uji coba LK Relawan	M2 - M4 Agustus 2021
6	Pelaksanaan kegiatan	M1 September - M2 Desember 2021
7	Supervisi	M1 Sept - M1 Desember 2021

Kegiatan Penjaminan Kualitas Data Wisatawan Nusantara MPD Tahun 2022 dilakukan pada periode waktu bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Untuk Wilayah Kabupaten Bekasi, relawan yang direkrut sebanyak sepuluh orang, terdiri dari empat orang relawan dari provinsi dan enam orang relawan dari BPS Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi menjadi sampel karena bersesuaian

dengan Kegiatan Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2020, dimana kegiatan Statistik Wisatawan Nusantara hanya terdapat di kabupaten tersebut.

Kegiatan Penjaminan Kualitas Data Wisatawan Nusantara MPD Tahun 2022 bertujuan untuk:

1. Memperoleh data konfirmasi dan verifikasi pola perjalanan relawan wisnus;
2. Memperoleh data perjalanan relawan wisnus dengan *active positioning methode* melalui *google timeline* milik relawan.
3. Memperoleh data pengukuran penjaminan kualitas wisnus MPD.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan *Quality Assurance* (QA) atau penjaminan kualitas untuk penentuan lokasi tempat tinggal (*home*) dan tujuan perjalanan, serta untuk mengetahui seberapa tepat algoritma dalam memprediksi pergerakan dari objek amatan kegiatan. Hasil pengisian LK Relawan dijadikan sebagai alat untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi perjalanan relawan dari hasil MPD.

Kegiatan Statistik Wisatawan Nusantara di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 sepenuhnya adalah *ground check* lapangan dan supervisi kegiatan yang melibatkan relawan sebanyak 4 orang dari BPS Kabupaten Bekasi dan 6 orang relawan yang berasal dari BPS Kabupaten Sukabumi dengan kriteria pernah terlibat sebagai relawan wisatawan nusantara pada kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan Survei Wisatawan Nusantara MPD sangat diperlukan dalam rangka penyediaan data statistik wisatawan nusantara. Hasil kegiatan Survei Wisatawan Nusantara MPD adalah penyusunan publikasi Statistik Wisatawan Nusantara. Kegiatan Survei Wisatawan Nusantara MPD dilakukan dengan memanfaatkan MPD yang diolah dengan algoritma tertentu untuk mengestimasi jumlah wisatawan nusantara. Sementara upaya penjaminan kualitas dilakukan dengan membandingkan data MPD dengan hasil pencatatan perjalanan relawan untuk melihat tingkat kesesuaian hasil algoritma dengan kondisi lapangan.

3.6.3 SURVEI STATISTIK WISATAWAN MANCANEGERA

Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang diharapkan dapat menggerakkan sektor ekonomi lain yang terkait erat. Sehingga Pemerintah sangat memperhatikan pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara, yang pada akhirnya mampu menghidupkan sektor perekonomian seperti : perhotelan, angkutan, industri, dan lain-lain. Akan tetapi di masa pandemi covid-19 ini, di bandara Husein Sastranegara Bandung tidak melayani penerbangan bagi wisatawan mancanegara. Sehingga tidak ada data terkait perjalanan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bekasi.

3.6.4 SURVEI STATISTIK E-COMMERCE

Era baru globalisasi telah dimulai dengan semakin meningkatnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi. Dengan didukung teknologi dan infrastruktur yang semakin canggih, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam ekonomi berbasis digital telah mengglobalisasi pola supply dan demand para pelaku ekonomi dari berbagai sisi, seperti: pemasaran, pembelian, dan pendistribusian produk; sistem pembayaran, dan sebagainya. Kini, transaksi jual-beli produk dapat dilakukan dalam genggam jari yang berbasiskan jaringan elektronik. Hal inilah yang disebut E-Commerce. Kehadiran E-Commerce tidak hanya memberi andil dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, namun juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu-individu untuk menjadi *entrepreneur* yang ke depannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan

Dalam rangka pemetaan E-Commerce di Indonesia, BPS melanjutkan pendataan E-Commerce berbasis usaha rumah tangga dan perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha E-Commerce di Indonesia, dari sudut pandang pelaku usaha E-Commerce. Metode pendataan E-Commerce yang dilakukan pada Tahun 2022, menyesuaikan dengan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Era Digital saat ini. Penggunaan TIK dalam metode pengumpulan data menjadi tak terhindarkan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat di Era Digital saat ini yang memerlukan data dan informasi secara cepat, mudah, dan akurat *at anytime and anywhere*. Untuk itu, pendataan E-

Commerce 2021 akan diarahkan pada metode *Go Digital*, dengan berbasis CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) dan CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*).

Tujuan dari kegiatan pengumpulan data E-Commerce ini adalah: (a) Melakukan pemutakhiran kerangka sampel usaha/perusahaan E-Commerce dengan berdasarkan hasil CAPI di wilayah yang terpilih sampel, (b) Menyediakan data distribusi pelaku usaha E-Commerce di Indonesia, (c) Menyediakan indikator pokok yang terkait dengan E-Commerce (jumlah usaha, volume transaksi, nilai transaksi) yang sesuai dengan konsep standar internasional, (d) Mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menyajikan perkembangan transaksi E-Commerce di Era Digital.

Secara garis besar data yang dikumpulkan pada Survei Ecommerce terdiri dari 3 bagian besar yakni: (a) Kerangka sampel usaha E-Commerce yang mutakhir (*up-to-date*), (b) Indikator Pokok E-Commerce, yang terdiri dari: Jumlah pelaku usaha, jenis barang dan jasa yang dijual, volume dan nilai transaksi, metoda pembayaran, serta cara pengiriman, (c) Kajian analisis peta E-Commerce Indonesia dari hasil Big Data “Teknik *crawling*”.

Usaha/perusahaan E-commerce yang dicakup dalam survei ini adalah usaha/perusahaan yang melakukan transaksi penjualan barang/jasa melalui internet selama tahun 2020. Kategori usaha yang dicakup adalah A, C, G, H, I, J, M, N, P (kecuali Pendidikan Formal), Q, R, dan S.

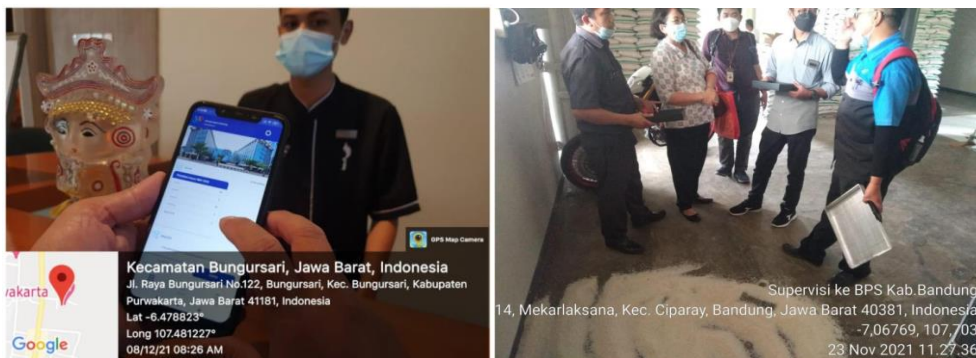
Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden dengan menggunakan CAPI dan CAWI. Survei E-Commerce dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan total sampel Blok Sensus sebanyak 558 BS dan total sampel usaha/perusahaan sebanyak 1.249 usaha/perusahaan. Survei dilakukan dengan menggunakan metode *door-to-door*, yaitu mengunjungi responden secara langsung ke rumah atau ke tempat usahanya. Selain itu survei ini juga menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*), artinya petugas melakukan wawancara langsung dientrikan

menggunakan *smartphone* masing-masing, sehingga meminimalisir penggunaan kertas fisik. Monitoring yang ditayangkan oleh BPS RI memungkinkan provinsi untuk memantau kegiatan lapangan yang dilaksanakan di kabupaten/kota.

Capaian target survei ini sampai akhir tahun untuk listing sebesar 100 persen, sedangkan untuk sampel sebesar 99,29 persen, yaitu mencapai 1240 usaha/perusahaan. Berikut ini rincian penerimaan dokumen menurut kabupaten/kota:

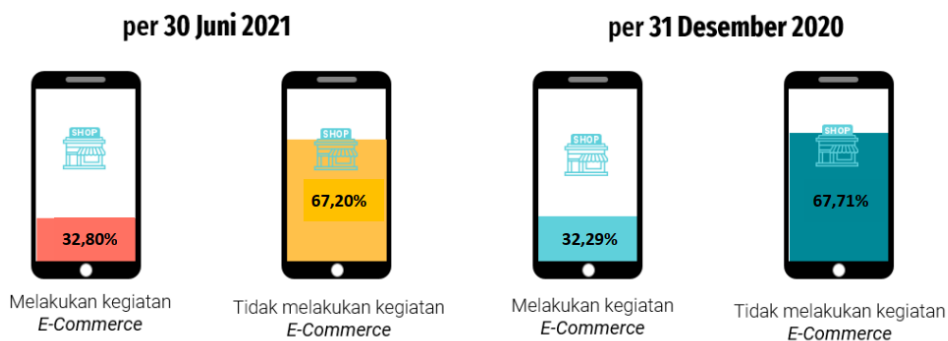
KABUPATEN	Target Listing	Realisasi	Persen-tase	Target Sampel	Realisasi	Persen-tase
[16] BEKASI	24	24	100	57	57	100

Pengecekan aplikasi ICS pada Responden E-commerce



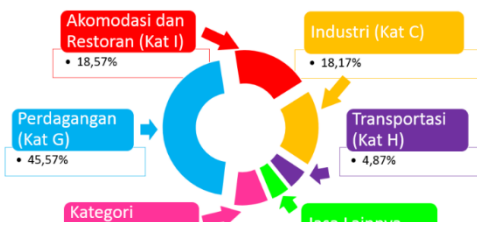
HASIL ANALISIS

Persentase Usaha E-Commerce Kabupaten Bekasi, Tahun 2020 dan 2021



ECOMMERCE MENURUT LAPANGAN USAHA/KATEGORI, 2020

Hasil Survei Ecommerce, BPS



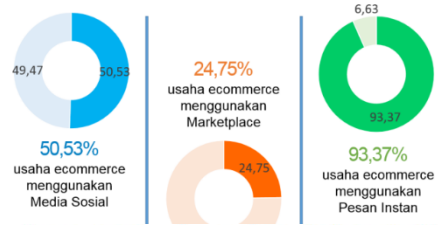
METODE PEMBAYARAN YANG SERING DIGUNAKAN ECOMMERCE, 2020

Hasil Survei Ecommerce, BPS



ECOMMERCE MENURUT MEDIA YANG DIGUNAKAN, 2020

Hasil Survei Ecommerce, BPS



Persentase Usaha E-commerce menurut Barang dan Jasa yang Dijual Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020



Secara umum kegiatan Survei E-commerce di Kabupaten Bekasi sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari pemasukan dokumen yang ada sudah mencapai 99,29 persen. Beberapa kendala yang dihadapi adalah petugas masih belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi CAPI yang terbilang baru sehingga ada kekhawatiran petugas salah klik sehingga data yang sudah dientri dapat terhapus. Selain itu, terjadi rusaknya server BPS mengakibatkan semua data survei yang sudah dikirim terhapus. Hal tersebut menyebabkan lamanya proses *recovery* data, serta ada beberapa data yang tidak bisa dipulihkan sehingga harus entri ulang, bahkan ada yang harus melakukan pencacahan ulang.

Diharapkan kedepannya BPS dapat mengembangkan kembali aplikasi ICS agar lebih stabil, baik dari sisi server maupun dari segi fasilitas. *Disaster Recovery System* (DRC) harus bisa diterapkan pada server ICS. Jangan ada lagi kejadian pencacahan ulang akibat aplikasi ICS yang bermasalah maupun server yang rusak. Selain itu, ICS hendaknya bisa dikembangkan lebih fleksibel di beberapa perangkat, baik Android, iOS, maupun versi *Webentry*-nya. Selain itu, hendaknya kemampuan petugas lapangan akan teknologi baru sebaiknya ditingkatkan kembali, bisa melalui sistem pelatihannya maupun dalam hal perekrutannya.

Selain itu ada peluang bahwa BPS dapat memanfaatkan potensi *Big Data* sebagai sumber baru dalam melakukan pengumpulan data E-Commerce. Dengan

begitu data BPS akan lebih akurat serta diharapkan biaya yang diperlukan juga bisa semakin efisien.

3.6.5 SURVEI STATISTIK TANAMAN PANGAN/UBINAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya peran subsektor tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan.

Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
2. Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), penggunaan pupuk, penanggulangan OPT, dan lain-lain.

Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluruh Kabupaten Bekasi. Informasi pokok yang dikumpulkan melalui Survei Ubinan adalah data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubijalar. Informasi pendukung lainnya yang juga dikumpulkan dalam Survei Ubinan antara lain koordinat lokasi ubinan, jenis lahan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), jenis kegiatan peningkatan produksi, banyaknya benih yang digunakan, jenis varietas benih yang digunakan (khusus padi dan jagung),

banyaknya pupuk yang digunakan, informasi earn pengendalian terkena serangan hama/OPT, informasi bantuan benih, pupuk, alsintan, dan informasi kualitatif terkait dengan produktivitas.

Data yang dikumpulkan adalah hasil ubinan mencakup: Data produktivitas SR I (Bulan Januari - April 2021), data produktivitas SR II (Bulan Mei - Agustus 2021) dan Data produktivitas SR III (Bulan September - Desember 2021).

Kini Survei Ubinan menggunakan pendekatan area, dimana berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan titik pengamatan pada subsegmen sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih kurat, cepat dan tepat waktu.

Pelaksanaan Lapangan Ubinan Padi dan Palawija



Output yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah angka produktivitas tiap kabupaten/kota seperti pada lampiran tabel berikut:

Angka Produktivitas SR I (periode Januari-April) Tahun 2022

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Produktivitas SR I Tahun 2022 (Kuintal/Ha)					
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang	Ubi	Ubi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3216	Bekasi	72,76	134,63	34,49	53,12	296,83	234,76
JAWA BARAT		57,21	134,63	34,49	53,12	296,83	234,76

Angka Produktivitas SR II (periode Mei- Agustus) Tahun 2022

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Produktivitas SR II Tahun 2022 (Kuintal/Ha)					
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang	Ubi	Ubi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3216	Bekasi	55,83	123,38	44,15	41,59	322,78	202,33
JAWA BARAT		55,23	123,38	44,15	41,59	322,78	202,33

Angka Produktivitas SR III (periode September- Desember) Tahun 2022
(Hasil sementara)

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Produktivitas SR III Tahun 2022 (Kuintal/Ha)					
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang	Ubi	Ubi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3216	Bekasi	57,72	125,46	41,30	51,50	371,49	238,92
JAWA BARAT		61,40	125,46	41,30	51,50	371,49	238,92

Data tentang ubinan ini bermanfaat untuk penghitungan angka produksi, dengan mengalikan angka luas panen dengan angka produktivitas. Angka ini sangat bermanfaat bagi Dinas Pertanian dan Hortikultura, dan banyak instansi lain di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Bidang Neraca BPS Kabupaten Bekasi juga menggunakan data produktivitas ini untuk penghitungan PDRB triwulanan.

Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Survei Ubinan Tahun 2022 untuk Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai

SOP yang berlaku. Masalah yang sering dihadapi adalah terlewatnya ubinan dikarenakan petani melakukan panen lebih awal dari jadwal yang sudah disepakati. Dengan adanya Survei Ubinan yang sampelnya diambil dari KSA, petugas kesulitan menemukan rumah tangga pemilik sawah untuk di wawancara. Mengakibatkan banyak sampel target menjadi tidak terpenuhi.

Selain terkendala oleh jadwal yang terlewat, petugas juga terkendala oleh jumlah alat ubinan yang terbatas, dan keberadaan alat ubinan dengan lokasi sampel ubinan sangat jauh, hal ini bisa menyebabkan terlewatnya jadwal panen, dan ada beberapa yang alat ubinan sudah tidak lengkap

Untuk mengatasi kendala diatas, BPS Kabupaten Bekasi sudah mengintruksikan menuliskan nomor *handphone* petani agar petugas bisa koordinasi dengan petani sehingga tidak terlewat panen. Sedangkan untuk Survei ubinan dengan sampel dari KSA BPS Provinsi melakukan evaluasi dan konfirmasi kepada BPS Kabupaten Kota untuk menginstruksikan petugas agar segera mengidentifikasi lokasi rumah tangga pemilik sawah jauh hari sebelum subsegmen itu akan dijadwalkan panen. Untuk mengatasi permasalahan sampel yang lewat panen, BPS Priovinsi Kabupaten Bekasi menginstruksikan agar sampel pengganti pun dicacah untuk menambah kekurangan realisasi ubinan sampel utama. Walaupun masih belum memenuhi target, namun upaya maksimal telah dilakukan.

BPS Provinsi mengintruksikan BPS Kabupaten/kota untuk menginventarisir alat ubinan yang telah rusak ataupun tidak lengkap dan segera melaporkannya. BPS Provinsi mengirimkan beberapa alat ubinan baru kepada BPS kabupaten/kota untuk mengganti alat ubinan yang telah rusak maupun tidak lengkap.

3.6.6 SURVEI STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI METODE KSA

Hingga saat ini pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas

panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Meskipun secara praktikal, metode tersebut mudah untuk diterapkan tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Dalam rangka mendukung perbaikan data pertanian di Indonesia. Salah satu poin penting pada rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah usulan untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi secara luas metode estimasi produksi padi melalui Kerangka Sampel Area (KSA) yang mengintegrasikan data spasial dan data lapangan menggunakan teknologi komunikasi digital yang lebih obyektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)”.

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah suatu metode baru yang dikembangkan oleh BPPT bekerjasama dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Maksud dan Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan sistem KSA ini juga diimplementasikan dengan satu aplikasi lagi yang dibuat oleh BPS yaitu Aplikasi KSA Pro yang merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA) selama ini.

Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dilakukan dengan metode *dot sampling*. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah perangkat/HP android milik pribadi yang sudah terinstall sistem aplikasi KSA versi BPPT dan aplikasi KSA Pro versi BPS.

Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan



Untuk Kabupaten Bekasi sendiri terkena 2.602 sampel segmen KSA Padi dan 1421 sampel Segmen KSA Jagung pada bulan Januari s/d Desember. Rincian sampel untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

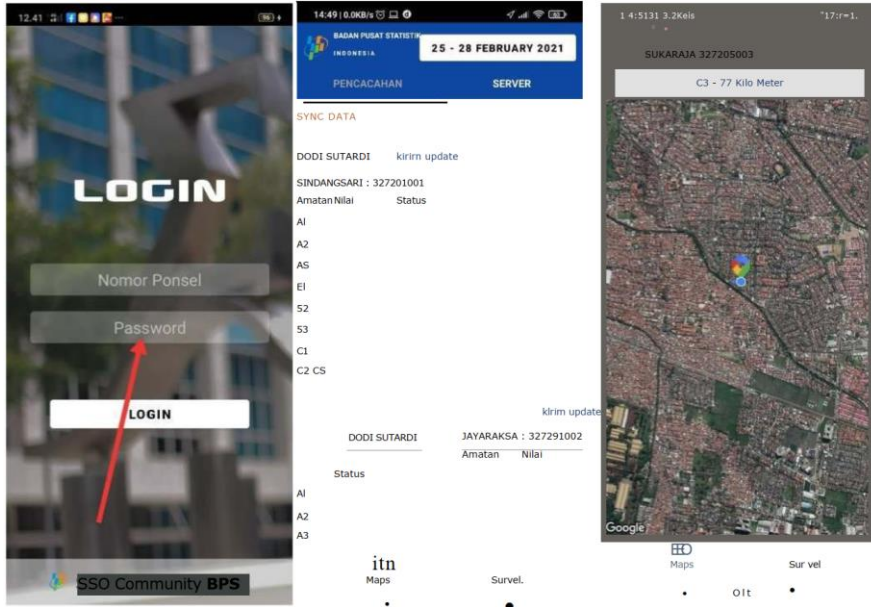
Sebaran Target Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi
Dengan Metode Kerangka Sampel Area Komoditas Padi dan Jagung Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Bulan Januari- Bulan Desember)

No	Prov	Kab	Nama Kab	Target Komoditas Padi	Target Komoditas Jagung
16	32	16	Bekasi	92	12

Waktu pencacahan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area adalah bulan Januari-Desember 2021 yaitu pada 7 hari terakhir setiap bulannya. Petugas pencacah merupakan mitra statistik yang sudah dilatih sebelumnya. Jadwal pemeriksaan/pengawasan dilakukan selama rentang waktu pengamatan yaitu 7 hari terakhir setiap bulannya sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Petugas pemeriksa/pengawas adalah pegawai organik BPS yang sudah mengikuti pelatihan petugas KSA

Output yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah luas panen padi sampai level kabupaten/kota di Kabupaten Bekasi. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area ini bermanfaat bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bulog Kabupaten Bekasi serta Instansi lainnya, dan yang paling membutuhkan data ini nantinya adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, kaitannya dalam penetapan kebijakan terkait produksi tanaman pangan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Tampilan Aplikasi KSA Pro



LUAS PANEN PADI TOTAL HASIL KSA TAHUN 2021

Nama Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Jan-April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Mei-Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Sep-Des	Jan-Des
	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[3201] BOGOR	3031,05	6290,22	11791,43	3.238,54	24.351,24	2.062,29	5.476,16	8.532,32	4.370,14	20.440,91	3.136,12	5.086,82	2.381,33	2.030,05	12.634,32	57.426,47
[3202] SUKABUMI	2603,21	14114,02	23372,89	6.240,15	46.330,27	3.529,43	9.893,79	13.729,22	4.816,63	31.969,07	3.573,26	2.714,40	2.292,96	2.630,51	11.211,13	89.510,47
[3203] CIANJUR	5848,67	15109,47	20055,11	7.605,92	48.619,17	8.183,53	10.133,14	15.453,92	9.589,79	43.360,38	4.779,94	5.961,59	4.915,88	5.901,52	21.558,93	113.538,48
[3204] BANDUNG	2553,62	2482,53	4267,85	8.947,75	18.251,75	4.683,00	2.921,81	3.544,87	4.036,82	15.186,50	5.021,79	4.977,02	4.050,29	3.065,33	17.114,43	50.552,68
[3205] GARUT	4271,31	8707,32	11651,97	6.863,97	31.494,57	5.986,28	7.630,42	9.369,94	5.740,34	28.726,98	2.797,62	4.263,23	4.398,00	4.285,17	15.744,02	75.965,57
[3206] TASIKMALAYA	7252,44	14070,73	5368,9	3.767,30	30.459,37	7.284,45	11.100,62	6.737,23	3.262,44	28.384,74	3.004,26	5.542,42	8.781,06	6.762,99	24.090,73	82.934,84
[3207] CIAMIS	1028,21	4446,07	12154,61	6.433,56	24.062,45	3.016,34	2.285,81	8.460,96	5.710,63	19.473,74	3.499,90	4.772,46	1.126,67	2.077,81	11.476,84	55.013,03
[3208] KUNINGAN	2696,6	1820,35	10172,35	4.720,06	19.409,36	3.562,69	3.429,28	10.204,06	2.607,54	19.803,57	2.778,06	1.672,26	1.916,44	1.656,61	8.023,37	47.236,30
[3209] CIREBON	1515,18	736,76	13524,16	14.269,53	30.045,63	9.104,87	5.041,08	11.069,58	7.651,11	32.866,64	7.594,05	10.373,51	3.086,03	980,43	22.034,02	84.946,29
[3210] MAJALENGA	1739,77	1310,69	29592,07	11.528,24	44.170,77	3.846,09	5.291,32	24.573,25	9.625,87	43.336,53	2.264,55	3.222,92	2.883,64	1.637,21	10.008,32	97.515,62
[3211] SUMEDANG	2631,69	1428,57	8014,41	9.429,24	21.503,91	3.322,53	2.675,93	8.726,47	5.126,48	19.851,41	3.284,74	2.641,78	2.836,12	3.223,29	11.985,93	53.341,25
[3212] INDRAMAYU	1322,9	1562,06	27638,55	60.291,90	90.815,41	21.557,50	6.808,11	20.663,61	26.019,11	75.048,33	35.959,05	13.186,18	10.247,68	1.794,67	61.187,58	227.051,32
[3213] SUBANG	4319,72	1924,72	15075,35	26.671,38	47.991,17	28.543,18	7.462,07	12.656,07	10.096,61	58.757,93	6.731,01	21.775,92	18.227,41	10.463,28	57.197,62	163.946,72
[3214] PURWAKARTA	1125,27	1557,42	8222,9	2.149,40	13.054,99	1.778,44	2.648,97	7.065,79	2.569,95	14.063,15	1.219,42	2.088,62	1.371,42	1.133,06	5.812,52	32.930,66
[3215] KARAWANG	23449,36	6010,41	10516,18	15.538,87	55.514,82	18.169,45	27.877,76	24.526,23	6.305,15	76.878,59	9.325,91	17.417,87	15.587,25	23.191,81	65.522,84	197.916,25
[3216] BEKASI	1905,61	6762,4	7138,44	7.888,93	23.695,38	6.916,28	16.933,90	14.933,50	2.235,03	41.018,71	5.374,29	6.967,65	6.780,38	16.501,92	35.624,24	100.338,33
[3217] BANDUNG BAR	1985,92	1304,82	5430,56	2.309,02	11.030,32	1.930,35	1.872,54	5.422,75	1.551,64	10.777,28	1.589,66	1.718,44	1.173,29	1.365,57	5.846,96	27.654,56
[3218] PANGANDARA	132,68	3501,62	9464,99	1.817,54	14.916,83	120,37	309,07	4.542,23	5.278,52	10.250,19	2.271,85	197,90	0,00	41,03	2.510,78	27.677,80
[3271] BOGOR	2,58	0	6,44	0,00	9,02	2,59	3,86	6,44	2,58	15,47	2,58	1,29	1,29	6,44	11,60	36,09
[3272] SUKABUMI	207,2	165,15	405,87	113,05	891,27	90,70	251,00	293,64	269,23	904,57	25,70	105,83	200,62	328,18	660,33	2.456,17
[3273] BANDUNG	28,29	20,47	80,9	222,59	352,25	141,25	41,94	26,68	67,23	277,10	119,51	108,20	110,42	58,09	396,22	1.025,57
[3274] CIREBON	0	6,94	15,76	78,30	101,00	11,80	7,66	4,32	72,40	96,18	0,00	4,95	5,95	23,60	34,50	231,68
[3275] BEKASI	52,23	5,43	81,26	57,50	196,42	2,35	92,48	24,93	80,08	199,84	27,14	34,82	17,41	2,35	81,72	477,98
[3276] DEPOK	0	15,71	9,31	2,91	27,93	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	2,91	0,00	0,00	8,73	11,64	45,39
[3277] CIMAH	2,84	8,51	2,84	14,20	28,39	8,51	5,67	2,84	0,00	17,02	5,68	14,18	11,35	0,00	31,21	76,62
[3278] TASIKMALAYA	174,94	1243,46	1712,29	438,37	3.569,06	180,93	529,36	1.582,08	701,38	2.993,75	483,59	475,60	523,06	494,78	1.977,03	8.539,84
[3279] BANJAR	0	39,96	1724,43	788,90	2.553,29	196,18	39,96	1.208,64	342,34	1.787,12	253,51	745,17	384,24	0,00	1.382,92	5.723,33
[3200] JAWA BARAT	69.881,29	94.645,81	237.491,82	201.427,12	603.446,04	134.231,38	130.763,71	213.367,38	118.129,04	596.491,51	105.126,10	116.071,03	93.310,19	89.664,43	404.171,75	1.604.109,30

3.7 Penghargaan, Quick Wins dan Agenda Perubahan

3.7.1. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2022, BPS Kabupaten Bekasi berhasil memperoleh beberapa penghargaan baik itu dari pihak internal dan eksternal. Penghargaan diberikan dalam rangka prestasi di kegiatan teknis dan pelayanan publik. Beberapa penghargaan yang diterima oleh BPS Kabupaten Bekasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Penghargaan yang Diterima BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Jenis Penghargaan	Peringkat	Bulan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satker dengan Response Rate Tertimbang Tertinggi Survei Perusahaan Konstruksi Tahun 2020	Ke - 4	Februari 2021	BPS RI
2.	Satker dengan Kinerja Terbaik Kegiatan Survei Statistik Pertambangan dan Energi Tahun 2020	Ke - 3	Februari 2021	BPS RI
3.	Satker sebagai Lokasi Ujicoba Persiapan Sensus Pertanian Tahun 2023	-	April 2021	BPS RI
4.	Satker Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan BPS Tahun 2022	-	Juli 2021	BPS RI
5.	Penyusunan LK Tingkat UAPPA-W Tahun 2020 Kategori 21 s/d. 30 UAKPA	Ke - 1	September 2021	Kanwil DJPB Kabupaten Bekasi
6.	Pengelolaan Website Terbaik	Ke - 2	September 2021	BPS RI
7.	Satker paling awal dalam penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Rekonsiliasi	Tanginas Award	Oktober 2021	KPPN Bandung II
8.	Satker dengan Capaian Respon Rate Tertimbang Tertinggi dalam kegiatan Survei Statistik	Ke - 3	November 2021	BPS RI

	Pertambangan dan Energi Tahun 2022			
9.	Unit Kerja Pelayanan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022	-	Desember 2021	MenPan-RB



Gambar 3.30.
Penghargaan yang Diterima BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

3.7.2. Quick Wins BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

- Penganan Zona Integritas di BPS Kabupaten Bekasi

3.7.3. Agenda Perubahan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

- Raih WBK/ WBBM

4 *PENUTUP*

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2020

4.1. Tinjauan Umum

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 BPS Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Tahun 2020 – 2024, hal tersebut merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS Kabupaten Bekasi periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yaitu:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kabupaten Bekasi 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi pada Tahun 2022 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarnya.

Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada Tahun 2022 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya sebagian besar juga telah berhasil dicapai dengan cukup baik, meski di tengah pandemi Covid 19. BPS Kabupaten Bekasi telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tertuang dalam visi dan misi dan tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2021 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil laporan di atas, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bekasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Kesimpulan tersebut terlihat dari indikator tujuan dan indikator sasaran strategis.

Dari keempat tujuan yang ditetapkan ditandai dengan rata-rata pencapaian sebesar 106,09 persen. Dimana capaian kinerja tujuan pertama dengan sasaran pertama adalah 111,44 persen, capaian tujuan kedua dengan sasaran kedua adalah 110,00 persen, untuk tujuan ketiga dengan sasaran ketiga adalah 100,00 persen dan tujuan keempat dengan sasaran keempat adalah sebesar 99,86 persen. Selain capaian kinerja yang cukup berhasil, prestasi juga diraih oleh BPS Kabupaten Bekasi pada Tahun 2022 melalui prestasi sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hasil penilaian KemenpanRB Tahun 2022.

Kemudian dalam rangka terwujudnya birokrasi *good governance*, BPS Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan pembinaan SAKIP se- Kabupaten Bekasi guna menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih yang memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna nantinya akan tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Sebagai bentuk peningkatan SAKIP di BPS Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatnya perolehan nilai SAKIP dari 73,61 point di tahun 2020 menjadi 73.74 point di Tahun 2022.

4.2. Tantangan dan Kendala Utama

Secara umum BPS Kabupaten Bekasi telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data;
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data;
3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik;
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bekasi;
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi;
2. Memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*);
3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data;
4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses output yang dijalankan;
5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran;
6. Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/kota dan SKPD.

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi (Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020)



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BEKASI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevi Hendri, S.Si.,MM
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dyah Anugrah Kuswardani MA
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dyah Anugrah Kuswardani MA.
NIP. 196203141985012001

Bekasi, 7 April 2021
Pihak Pertama

Nevi Hendri, S.Si., MM
NIP. 19721130 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPS KABUPATEN BEKASI

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	70
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	70
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	33.33
	Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	70
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	35
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	61
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	80



Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen	Rp. 6.204.982.000,-
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 7.582.333.000,-

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

(Dyah Anugrah Kuswardani, MA)
NIP. 19620314 198501 2 001

Bekasi, 7 April 2021
Kepala BPS Kabupaten Bekasi

Nevi Hendri, S.Si., MM
NIP. 19721130 199203 1 001



Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2022

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Deputi Bidang Statistik Sosial													
1	Pendataan Potensi Desa				Apr								
2	Pendataan Short Form SP2020		Feb	Mar				Jul					
3	PES SP2020								Agu	Sep			
4	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran		Feb						Agu				
5	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan								Agu				
6	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi	Jan	Feb	Mar						Sep			
7	Uji Coba PODES 2021									Sep			
8	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)					Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
9	Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)					Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
10	Penyusunan Statistik Politik Keamanan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	
11	Survei Perilaku Anti Korupsi)		Feb	Mar	Apr								
Deputi Bidang Statistik Produksi													
12	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
13	Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
14	Pendataan Statistik E-Commerce				Apr	Mei	Jun	Jul					
15	Persiapan Sensus Pertanian									Sep	Okt		
16	Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
17	Pengembangan Data Hortikultura Potensi dengan Menggunakan Frame ST2013 Per Komoditas Per Rumah Tangga				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
18	Survei Perusahaan Perkebunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
19	Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
20	Survei Pertanian Terintegrasi								Agu				
21	Survei Komoditas Perikanan Potensi 2021					Mei							
22	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun						
23	Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan Komoditas Strategis Tahun 2020				Apr								
24	Survei Perusahaan Kehutanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
25	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		Jul			Okt		Des
26	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
27	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
28	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan								Agu				
29	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Jan			Apr			Jul			Okt		
30	Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA)							Jul					
31	Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori				Apr	Mei	Jun	Jul					

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32	Survei Konstruksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa													
33	Passenger Exit Survei (PES)			Mar				Jul	Agu			Nov	
34	Survei Wisatawan Nusantara				Apr			Jul			Okt		Des
35	Kompilasi Data Statistik Ekspor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
36	Survei Impor Daerah Perbatasan			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
37	Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan	Jan			Apr			Jul			Okt		
38	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi	Jan			Apr			Jul			Okt		Des
39	Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa				Apr	Mei							
40	Survei Perdagangan Antar Wilayah				Apr	Mei	Jun	Jul					
41	Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan					Mei	Jun	Jul	Agu				
42	Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
43	Survei Statistik Harga Produsen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
44	Indeks Kemahalan Konstruksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
45	Survei Harga Perdagangan Besar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
46	Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
47	Survei Harga Perdesaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
48	Statistik Lembaga Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul					
49	Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul					
50	Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
51	Survei Bidang Jasa Pariwisata	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
52	Survei Outbound				Apr		Jun	Jul			Okt		
53	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik													
54	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
55	Metropolitan Statistical Area (MSA)				Apr	Mei	Jun	Jul					
56	Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKNTP Barang)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
57	Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKNTP Jasa)		Feb		Apr			Jul			Okt		
58	Penyusunan Matriks Trade and Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
59	Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
60	Implementasi SEEA dalam SISNERLING Indonesia				Apr	Mei	Jun	Jul					
61	Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/ Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
62	Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha					Mei	Jun	Jul	Agu				
63	Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES (Tanpa Subkomponen)		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
64	Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES (Tanpa Subkomponen)				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
65	Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan						Jun	Jul	Agu				

**Lampiran 4. Capaian Kinerja Triwulanan (CKT)
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan,	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	95,00	97,73	102,87
			Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan	Persen	TW I	4,00	4,00	22,22
					TW II	6,00	8,00	44,44
					TW III	10,00	13,00	77,78
					TW IV	17,00	21,00	120,00
2	T.2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	20,00	40,00	50,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	80,00	80,00	100,00
			Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	40,00	120,00	120,00
					TW IV	80,00	120,00	120,00
3	T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	40,00	40,00	50,00
					TW IV	80,00	80,00	100,00
4	T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	74,50	73,74	98,98
			Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	95,00	95,71	100,75

Lampiran 5. Respon Rate Sensus dan Survei Tahun 2022

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Pendekatan Rumah Tangga		142.080	125.851	88,58
Bidang Sosial				
	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	11.980	12.299	
	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	17.970	17.178	
	Pra Pemutakhiran Long Form SP2020	10.362	10.362	
	Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi	32.030	31.893	
	Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial	5.251	4.977	
	Survei Perilaku Anti Korupsi 2021	1.616	1.472	
	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2021	5.990	5.972	
Bidang Produksi				
	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	16.000	4.596	
	Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)	3.009	1.586	
	Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)	16.631	14.136	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	4.920	4.920	
	Survei Biaya Hidup (Listing)	450	450	
	Survei Harga Gabah	2.808	3.054	
	Survei Harga Perdesaan	8.016	8.016	
	Survei E-commerce (Listing)	558	558	
	Survei Wisatawan Mancanegara (Passenger Exit Survey)	29	0	
	Survei Profil Pasar (Konsumen)	860	860	
Bidang Neraca				
	Survei SKKRT Triwulanan	3.240	3.162	
	Survei SKTIR Tahunan	360	360	
Pendekatan Usaha		108.601	76.294	70,25
Bidang Produksi				
	Survei Perusahaan Perikanan Bulanan (Budidaya)	108	84	
	Survei Perusahaan Perikanan Tahunan (Penangkapan)	1	1	
	Survei TPI/PPI	288	288	
	Survei Perumahan Perkebunan Triwulanan	292	181	
	Survei Perumahan Perkebunan Tahunan	147	56	
	Survei Perusahaan Peternakan Tahunan (LTU, LTT, LTS)	239	117	
	Survei RPH/TPH	572	429	
	Survei KPPT	1.716	1.287	
	Survei Perusahaan Kehutanan (Perum dan STL)Tahunan	42	37	
	Survei Perusahaan Hortikultura (VP Horti)	23	17	
	Survei IBS Bulanan	5.148	2.796	
	Survei Tahunan Industri Perusahaan Manufactur	16.805	2.956	
	Survei IMK Triwulanan	6.808	5.106	

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
	Survei IMK Tahunan	11.064	11.064	
	Survei Updating Konstruksi	1.500	1.529	
	Survei Konstruksi Triwulanan	688	250	
	Survei Konstruksi Tahunan	591	250	
	Survei Pertambangan Energi	1.783	1.421	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	4.950	4.950	
	Survei Harga Perdagangan Besar	5.980	5.998	
	Survei Harga Kemahalan Konstruksi	324	324	
	Survei Harga Beras di Penggilingan	1.440	1.440	
	Survei Harga Produsen Sektoral	14.856	14.259	
	Survei Harga Produsen Pertanian	192	187	
	Survei Harga Produsen Jasa	1.296	1.254	
	Survei Harga Perdagangan International	1.848	1.154	
	Survei Valas	82	79	
	Survei Koperasi	1.023	1.058	
	Survei Badan Usaha Milik Daerah	96	95	
	Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa (POLDIS)	482	476	
	Survei Perdagangan dan PAW	1.617	1.262	
	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU)	801	387	
	Survei Profil Pasar (Pedagang)	1.134	1.146	
	Survei Transportasi (Bandara dan Pelabuhan)	144	108	
	Survei Dwelling Time (SDT)	33	12	
	Survei Hotel Bulanan (VHTS)	14.208	7.970	
	Survei Hotel Tahunan (VHTL)	2.909	806	
	Survei Daerah Tujuan Wisata (VDTW)	454	199	
	Survei Restoran (VREST)	1.271	208	
	Survei E-Commerce (Sampel Pencacahan)	1.249	1.240	
	Survei Karakteristik Usaha / Business Characteristics Survey (BCS)	1.454	946	
Bidang Nerwilis				
	Survei SKTNP Barang	160	150	
	Survei SKTNP Jasa	600	525	
	Survei SKNP	500	500	
	Survei SKSJ	150	150	
	Survei SMAK Tahunan	675	678	
	Survei SKSPPI Tahunan	585	592	
	Survei SKPS Tahunan	156	154	
	Survei PMTB NFS Tahunan	117	118	
Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha		91.907	91.934	100,03
Bidang Sosial				

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
	Pendataan Potensi Desa 2021	6.611	6.611	
	Survei Statistik Politik dan Keamanan 2021	3	3	
	Survei Statistik Lingkungan Hidup	2	2	
	Survei Sumber Daya Laut dan Pesisir	2	2	
	Penyusunan Data IDI 2020	2	2	
Bidang Produksi				
	Survei Kerangka Sampel Area Padi	31.224	31.224	
	Survei Kerangka Sampel Area Jagung	17.052	17.052	
	Survei Pengumpulan Data Luasan Tanaman Pangan (Padi Palawija)	15.048	15.048	
	Survei Pengumpulan Data Lahan, Benih dan Alsintan Tanaman	1.881	1.881	
	Survei Hortikultura Online (SPH Online)	15.675	15.675	
	Survei Kehutanan (Dinas) Triwulanan	4	4	
	Survei Hortikultura (Non Rumah Tangga; VN Horti)	8	8	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	1.704	1.704	
	Survei Keuangan Pemerintah Daerah	56	56	
	Survei Keuangan Pemerintah Desa	613	611	
	Survei Angkuta Penumpang dan Barang (SAPB)	45	45	
	Survei Panjang Jalan (PJ II/5 dan PJ II/6)	28	28	
	Survei Angkutan Jalan (AJR II/2 dan AJR II/3)	54	54	
	Survei Profil Pasar (Pengelola)	86	86	
Bidang Nerwilis				
	Survei SKLNPT Triwulanan	1.080	1075	
	Survei PMTB Tahunan	170	172	
	Survei SKLNP Tahunan	162	162	
	Survei Updating Direktori LNPRT Tahunan	270	306	
	Survei SKSIP Tahunan	27	23	
Bidang IPDS				
	Survei Kebutuhan Data (SKD)	100	100	

Lampiran 6. Tabel Bantu Anggaran, Realisasi, Efisiensi Dirinci Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun Anggaran 2021

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Ouput	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	111,44	7.510.295.000	7.402.529.182	98,57	11,55
		2896.BMA.004 Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik (Publikasi/Laporan)		21.500.000	19.981.800	92,94	
		2898.BMA.007 Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran (Layanan)		118.968.000	118.449.720	99,56	
		2899.BMA.006 Publikasi/Laporan Neraca Produksi (Layanan)		166.884.000	157.205.079	94,20	
		2900.BMA.005 Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei (Layanan)		14.190.000	13.218.750	93,16	
		2901.BMA.002 Sistem Informasi/ Aplikasi Yang Dibuat/ Dikembangkan/ Dipelihara (Layanan)		2.378.881.000	2.338.388.500	98,30	
		2902.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Yang Terbit Tepat Waktu (Layanan)		169.361.000	166.296.421	98,19	
		2903.BMA.009 Publikasi/Laporan Statistik Harga (Layanan)		502.412.000	497.091.571	98,94	
		2904.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi (Layanan)		232.571.000	230.363.375	99,05	
		2905.BMA.004 Publikasi/Laporan Sakernas (Layanan)		623.248.000	621.444.670	99,71	
		2905.QMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (Layanan)		871.337.000	863.969.841	99,15	
		2906.BMA.006 Publikasi/Laporan Susenas (Layanan)		1.004.309.000	1.000.115.977	99,58	
		2907.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial (Layanan)		132.332.000	130.564.393	98,66	
		2907.BMA.008 Publikasi/Laporan Pendataan Podes (Layanan)		230.931.000	230.199.375	99,68	
		2908.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan		107.305.000	103.131.076	96,11	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Ouput	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu (Layanan)					
		2908.QMA.006 Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Nusantara (Layanan)		42.040.000	35.831.105	85,23	
		2908.QMA.007 Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara (Layanan)		1.350.000	1.315.000	97,41	
		2908.QMA.009 Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce (Layanan)		404.884.000	390.750.546	96,51	
		2909.BMA.005 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu (Layanan)		128.595.000	125.926.079	97,92	
		2910.BMA.008 Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan (Layanan)		281.118.000	280.866.976	99,91	
		2910.QMA.007 Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan (Layanan)		55.389.000	54.915.578	99,15	
		2910.QMA.010 Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area (Layanan)		22.690.000	22.503.350	99,18	
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	110,00	30.100.000	28.694.159	95,33	13,34
		2897.BMA.004 Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik (Layanan)		30.100.000	28.694.159	95,33	
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	100,00	21.120.000	20.496.800	97,05	2,95
		2897.BDB.003 Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) (Lembaga)		21.120.000	20.496.800	97,05	
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	054.01.WA Program Dukungan Manajemen	99,86	19.378.656.000	19.276.802.890	99,47	0,39
		2886.EAA.001 Gaji dan Tunjangan (Layanan)		15.045.041.000	15.015.817.413	99,81	
		2886.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Layanan)		2.725.859.000	2.691.252.472	98,73	
		2886.EAB.001 Layanan Standar Biaya (Layanan)		18.120.000	17.130.000	94,54	
		2886.EAC.001 Layanan		4.940.000	4.912.281	99,44	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Ouput	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kerumah tanggaaan (Layanan)					
		2886.EAD.003 Peralatan Fasilitas Perkantoran (Unit)		233.318.000	225.836.127	96,79	
		2886.EAE.001 Gedung/Bangunan (M2)		534.957.000	524.811.133	98,10	
		2886.EAF.001 Layanan Administrasi Pegawai (Layanan)		596.496.000	578.711.964	97,02	
		2886.EAF.004 Layanan Jabatan Fungsional (Layanan)		137.100.000	136.988.000	99,92	
		2886.EAH.001 Layanan Transformasi BPS (Layanan)		61.500.000	61.238.500	99,57	
		2886.EAI.001 Layanan Humas (Layanan)		300.000	300.000	100,00	
		2886.EAL.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Layanan)		625.000	620.000	99,20	
		2886.EAN.003 Laporan Keuangan (Layanan)		20.400.000	19.185.000	94,04	

Lampiran 7. Tabel ARC Publikasi BPS Kabupaten Bekasi 2021

No.	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Deadline	Jadwal Rilis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2021	Daerah Dalam Angka	23/02/2021	26/02/2021	Rilis tepat waktu
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi Menurut Pengeluaran 2016-2020	Publikasi Lainnya	30/03/2021	05/04/2021	Rilis tepat waktu
3	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bekasi 2016-2020	Publikasi Lainnya	30/03/2021	05/04/2021	Rilis tepat waktu
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi 2021	Publikasi Lainnya	23/12/2021	28/12/2021	Rilis tepat waktu
5	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi 2021	Publikasi Lainnya	23/12/2021	28/12/2021	Rilis tepat waktu

Lampiran 8. Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan SKD 2021

Kode Daerah	Nama Daerah	Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan dan Money (%)
(1)	(2)	(3)
3200	Kabupaten Bekasi	97,73
3216	Bekasi	87,5

* Sumber : Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bekasi 2021

Lampiran 9. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST SKD 2021

Kode Daerah	Nama Daerah	Puas (%)
(1)	(2)	(3)
3200	Kabupaten Bekasi	95,71
3216	Bekasi	95,16

* Sumber : Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bekasi 2021

**Lampiran 10. Rincian Revisi DIPA Satker di Wilayah BPS Provinsi
Kabupaten Bekasi TA 2021 (Kondisi 1 Januari - 31 Desember
2021)**

Satuan Kerja	Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan	Keterangan Revisi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
BPS Kabupaten Bekasi	01	19 Februari 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat Perubahan sampel	52.574.222.000	45.250.584.000	-7.323.638.000	DJA	Perubahan Dasar hitung Karena Perubahan sampel dan Penghematan Anggaran akibat Pandemi Covid-19, sehingga Pagu Anggaran Satker berubah	Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-025/01000/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2021
	02	7 April 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Kabupaten Bekasi	45.250.584.000	40.707.675.000	-4.542.909.000	DJPB	Revisi DIPA Antar Satker dalam rangka pemindahan anggaran dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/ Kota se Kabupaten Bekasi	Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Kabupaten Bekasi Nomor : B-016/BPS/32511/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran
	03	10 Juni 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran	40.707.675.000	37.924.890.000	-2.782.785.000	DJA	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran SP Long Form	Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-106/01000/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2021
	04	8 Juli 2021	Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA	37.924.890.000	37.924.890.000	0	DJPB	Revisi Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA, revisi Interpolasi Pengadaan	Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No. B-

Satuan Kerja	Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan	Keterangan Revisi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
								ACPke 53 (Modal)	030/BPS/32 511/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran
	05	29 Juli 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Refocusing Anggaran Tahun 2021	37.924.890.000	28.644.331.000	-9.280.559.000	DJA	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Refocusing Anggaran Tahun 2021 dan Penghentian Kegiatan Long Form SP2020 pada Tahun 2022	Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-191/1000/P.R.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2021
	06	12 Agustus 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Refocusing Anggaran Tahun 2022 Tahap IV	28.644.331.000	26.998.207.000	-1.646.124.000	DJA	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Refocusing Anggaran Tahun 2022 Tahap IV dan penyesuaian Belanja Pegawai sesuai kebutuhan sampai dengan akhir tahun	Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-224/01000/PR.440/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2022 Tahap IV
	07	8 Oktober 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Optimalisasi Anggaran Tahun 2022	26.998.207.000	26.995.171.000	-3.036.000	DJA	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia terkait Optimalisasi Anggaran Tahun 2022, diantaranya pergeseran belanja 52 (Barang) ke Belanja 53 (Modal) yang mendukung kegiatan teknis	Berdasarkan Surat dari Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor : B-473/02000/PR.400/09/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran BPS Tahun Anggaran 2021
	08	29 November 2021	Revisi Antar Satker terkait Kekurangan Uang Makan BPS Kabupaten Tasikmalaya	26.995.171.000	26.940.171.000	-55.000.000	DJPB	Revisi Antar Satker terkait Kekurangan Uang Makan BPS Kabupaten Tasikmalaya	Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No.

Satuan Kerja	Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan	Keterangan Revisi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
								a dan Revisi Belanja Pegawai ke Belanja Barang Operasional	B-063/32511/PR.700/11/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Revisi Anggaran
	09	4 Desember 2021	Revisi DIPA terkait kegiatan Survei Efektifitas Program Bantuan Sosial Desember 2021	26.940.171.000	26.940.171.000	0	DJA	Revisi DIPA terkait kegiatan Survei Efektifitas Program Bantuan Sosial Desember 2021 bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dan realokasi anggaran satker Sekretariat Utama BPS	Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-1111/02100/PR.440/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Survei Efektifitas Program Bantuan Sosial Desember 2021
	10	28 Desember 2021	Revisi Pemutakhiran POK	26.940.171.000	26.940.171.000	0	DJPB	Revisi Pemutakhiran POK terkait kebutuhan Belanja Pegawai Gaji dan Pengawasan ke BPS Kabupaten/ Kota	Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Bekasi No. B-069/32511/PR.700/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan



DATA
MENCERDASKAN BANGSA

